

**PENGARUH PENERAPAN PRINSIP PRINSIP *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA
PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO)**



Diajukan oleh :

**HARLIN
4514013018**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Prinsip Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar
Nama Mahasiswa : Harlin
Stambuk/NIM : 45 14 013 018
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Tempat Penelitian : PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar

Telah Disetujui :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Faridah,SE.,M.Si.,Ak.,CA


Thanwain,SE.,M.Si

Mengetahui dan Mengesahkan :

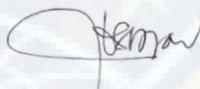
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa

Ketua Jurusan
Akuntansi


Dr. H. Andi Arifuddin Manne, SE., M. Si., SH., MH


Dr. Firman manne, SE., M. Si., Ak., CA

Tanggal Pengesahan :

PENGARUH PENERAPAN PRINSIP PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO)

**Oleh :
HARLIN**

**Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa Makassar**

ABSTRAK

Harlin.2018.Skripsi. Pengaruh prinsip prinsip good corporate governance terhadap kinerja perusahaan pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero), (dibimbing oleh Faridah, SE,M.Si,Ak,Ca, sebagai konsultan I dan Thanwain, SE,M.Si, sebagai konsultan II).

Penelitian ini adalah sebuah studi yang dilakukan disebuah perusahaan galangan kapal milik Pemerintah Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengaruh penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja perusahaan. Prinsip-prinsip dari Good Corporate Governance (GCG) ada 5, yakni : (1) transparansi, (2) akuntabilitas, (3) pertanggungjawaban, (4) indenpendensi, (5) keadilan. Sedangkan Kinerja Perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam suatu periode tertentu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penerapan prinsip prinsip Good Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero).

Metode penelitian yang dilakukan adalah metedo regresi berganda. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan program SPSS 20.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja perusahaan pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero).

Kata Kunci : Good Corporate Governance, Kinerja Perusahaan

***THE INFLUENCE OF APPLICATION OF THE GOOD CORPORATE
GOVERNANCE PRINCIPLE PRINCIPLES TO COMPANY
PERFORMANCE
AT PT INDONESIA KAPAL INDUSTRY (PERSERO)***

By:

HARLIN

***Accounting Study Program of the Faculty of Economics
Bosowa University Makassar***

ABSTRACT

HARLIN.2018. Essay. The influence of the principles of good corporate governance on the company's performance at PT Kapal Indonesia Industry (Persero), (supervised by Faridah, SE, M.Sc, Ak, Ca, as consultant I and Thanwain, SE, M.Sc., as consultant II).

This research is a study conducted in a shipyard company owned by the Government of Indonesia. The purpose of this study was to find out about the influence of the application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) on company performance. There are 5 principles of Good Corporate Governance (GCG), namely: (1) transparency, (2) accountability, (3) accountability, (4) independence, (5) justice. While the Company Performance is a description of the financial condition of a company that is analyzed by financial analysis tools, so that it can be known about the good and bad financial condition of a company that reflects work performance in a certain period.

The formulation of the problem in this study is how the influence of the application of the principles of Good Corporate Governance to the performance of the company at PT Indonesia Kapal Industries (Persero).

The research method used is multiple regression metedo. The data obtained were analyzed using SPSS 20 program.

The results of this study indicate that the independent variable has a significant effect simultaneously on the performance of the company at PT Indonesia Kapal Industries (Persero).

Keywords: Good Corporate Governance, Company Performance

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harlin

NIM : 4514 013 018

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul : Pengaruh Penerapan Prinsip Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 18 Agustus 2018
Mahasiswa yang bersangkutan

Harlin

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi dalam tahap penyelesaian studi pada Program Strata Satu (SI) dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini digunakan untuk menyelesaikan Studi Pendidikan Sarjana Ekonomi sekaligus memenuhi persyaratan Ujian Sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar dengan judul :

“Pengaruh Penerapan Prinsip Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero)”

Atas berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk memberikan segala yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah dan kuasanya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. M. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Dr.H.Andi Arifuddin Manne, SE, M.Si, SH, MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
4. Ibu Faridah, SE, AK, M.Si, CA selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Thanwain, SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
6. Ibu Ripah Fadrariani, selaku Dosen Pembimbing Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang selalu memberikan masukan dan pembekalan tentang kegiatan PKL.
7. Ibu Fatimah Az-zahra, S.Pd.,M.Pd selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dengan sabar membimbing di lokasi KKN.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Papa Hariyanto Palayak dan Mama Lince Tulian yang telah melahirkan, membesarkan, merawat dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta kesabaran sehingga penulis mampu menyelesaikan jenjang pendidikan.
9. Kepada Mamy ku tersayang Martha. S. Given yang selalu memberikan dukungan.
10. Kepada adik-adikku tersayang Yan dan Hari serta Kevin yang selalu memberikan semangat dan dukungan. Love you guys.
11. Teman-teman Akuntansi 014, AK-A dan AK-B
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dalam bentuk perhatian, cinta dan kasih dan selalu mendoakan saya, Terimakasih. GBU.

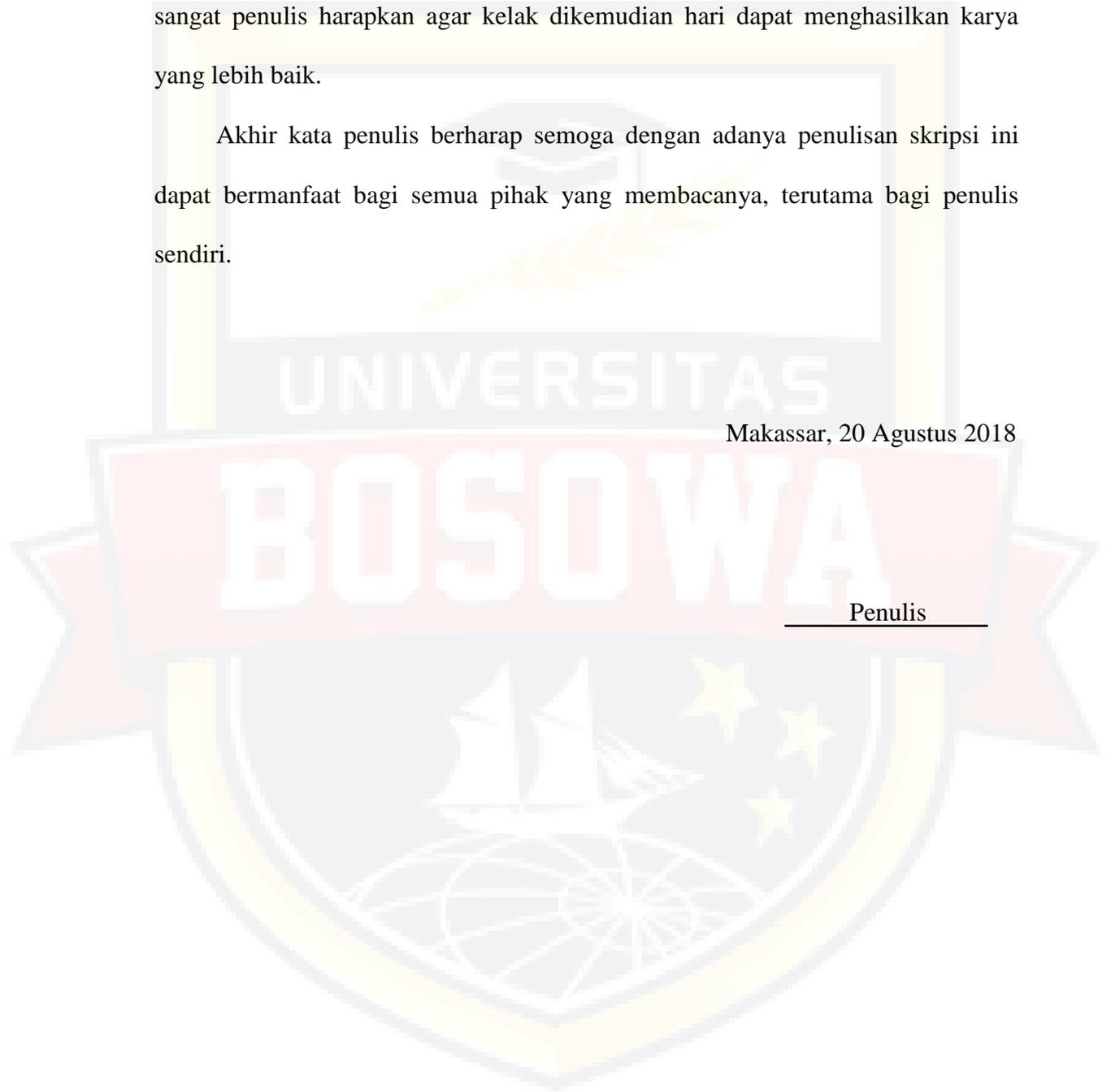
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu, segala kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak dikemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan adanya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri.

Makassar, 20 Agustus 2018

BOSOWA

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEORISINILAN	v
KATA PENGHANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Teori Keagenan	6
2.1.2 <i>Good Corporate Governance</i>	8
1. Definisi <i>Good Corporate Governance</i>	8
2. Prinsip Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	11
3. Tujuan <i>Good Corporate Governance</i>	13
4. Manfaat <i>Good Corporate Governance</i>	14
2.1.3 Kinerja Perusahaan	14

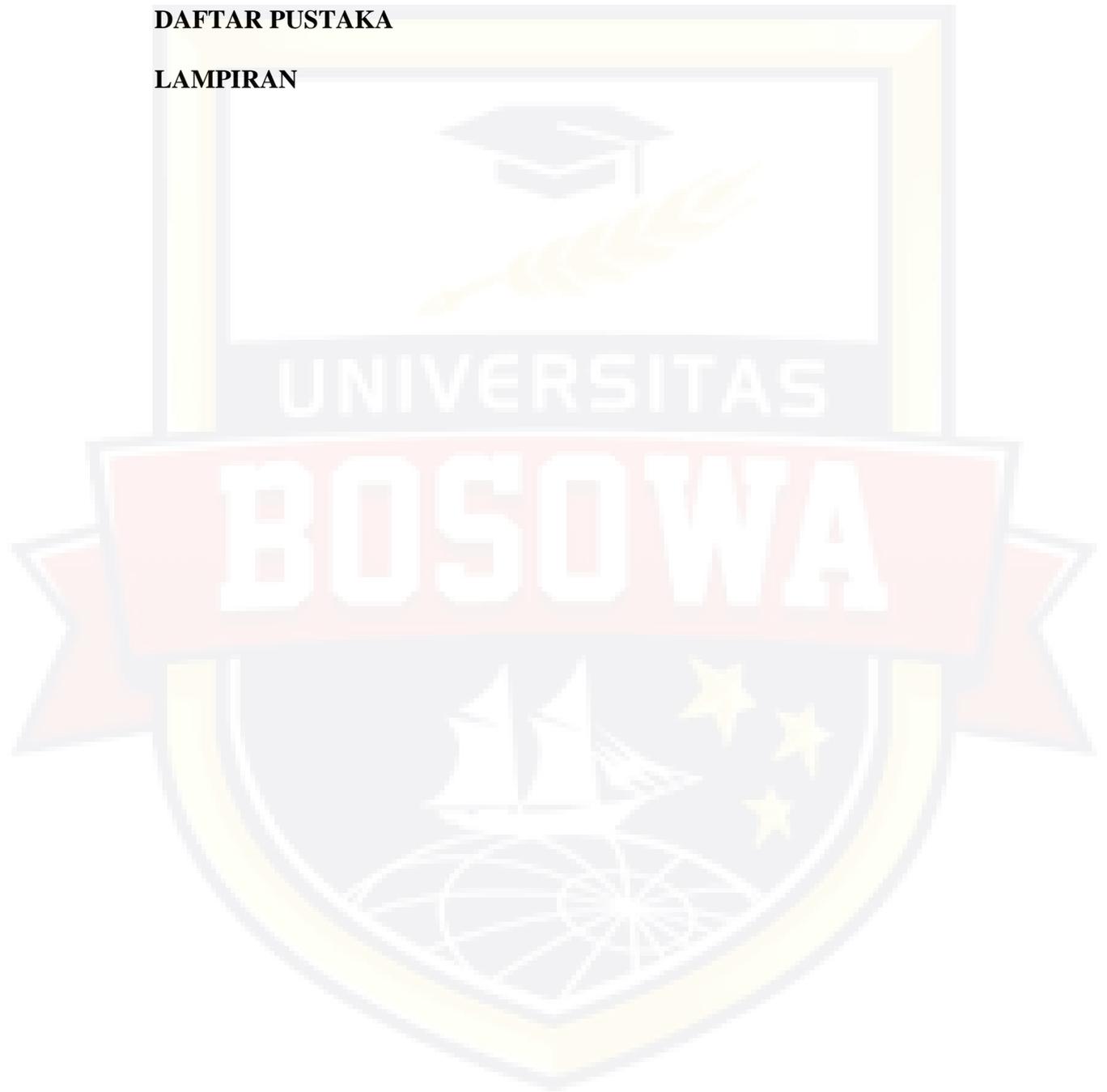
1. Definisi Kinerja Perusahaan	14
2. Penilaian Kinerja Perusahaan	15
3. Tujuan Penilaian Kinerja Perusahaan	17
4. Manfaat Penilaian Kinerja Perusahaan	18
2.1.4 Dewan Komisaris	20
2.1.5 Dewan Direksi	20
2.1.6 Komisaris Independen	21
2.1.7 Komite Audit	22
2.1.8 Pengaruh Penerapan GCG Terhadap Kinerja Perusahaan	23
2.2 Kerangka Pikir.....	24
2.3 Rumusan Hipotesis.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1 Daerah Penelitian dan Waktu Penelitian	26
3.2 Metode Pengumpulan Data	26
3.3 Jenis dan Sumber Data	27
3.4 Metode Analisis.....	27
3.5 Analisis Data	28
3.5.1 Statistik Deskriptif	28
3.5.2 Uji Asumsi Normalitas	28
3.5.3 Uji Asumsi Multikolonieritas	29
3.6 Uji Hipotesis	29
3.6.1 Uji T	29
3.6.2 Uji F	30

3.6.3 Koefisien Determinasi	30
3.7 Definisi Operasional	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	33
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan	33
4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan	37
4.1.3 Uraian Tugas	40
4.1.3 Bidang Usaha Perusahaan	44
4.2 Analisis Data Responden	47
4.2.1 Berdasarkan Responden	48
4.2.2 Berdasarkan Pendidikan	48
4.2.3 Berdasarkan Masa Kerja	49
4.3 Analisis Data Koesioner	50
4.3.1 Analisis Data Deskriptif	50
4.3.2 Analisis Linear Berganda	54
4.3.3 Uji Normalisasi Data	56
4.3.4 Uji Asumsi Multikolonieritas	59
4.3.5 Uji Autokorelasi	61
4.4 Uji Hipotesis	61
4.4.1 Uji T	61
4.4.2 Uji F	63
4.4.3 Koefisien Determinasi	64
BAB V PENUTUP	65

5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	48
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	50
Tabel Statistik Deskriptif	51
Tabel Regresi Linear Berganda	56
Tabel Tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test	56
Tabel Uji Multikolinearitas	60
Tabel Durbin Watson	61
Tabel Uji T	62
Tabel Uji F	63
Tabel Koefisien Determinasi	64

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Dunia usaha yang terus berkembang sehingga menjadi perusahaan persero telah mendorong para stakeholder untuk mengembangkan dan mentransformasi struktur usaha perusahaan mereka untuk menghasilkan hasil yang efektif sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Penerapan *Corporate Governance* secara benar dan konsisten diharapkan dapat menciptakan fundamental yang kuat bagi peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang melalui peningkatan kinerja yang tinggi serta pencapaian citra perusahaan yang positif.

Good Corporate Governance lebih cenderung pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan *stakeholders*, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar analisis dalam mengkaji *Good corporate governance* di suatu negara dengan memenuhi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indenpendensi dan keadilan dalam pengambilan keputusan yang sistematis yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja perusahaan.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan perusahaan sangat penting artinya karena secara langsung akan memberikan tujuan yang jelas bagi perusahaan untuk memungkinkan pengambilan keputusan secara bertanggungjawab dan memungkinkan pengelolaan perusahaan secara lebih baik, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan menjaga

kepercayaan dari mitra usaha. *Good Corporate Governance* merupakan bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, di dalamnya tercakup suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham (publik) sebagai pemilik perusahaan dan kreditur untuk memperoleh kembali atas investasi yang ajar sebagai penyandang dana eksterm, tepat dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan (www.fcgi.com).

Sistem tata kelola perusahaan yang baik didasari dari dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Ada beberapa prinsip yang dibutuhkan untuk membangun suatu budaya bisnis yang sehat, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan keadilan (*fairness*). Kelima prinsip ini kemudian dikenal sebagai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Riset The *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) (2002), menemukan bahwa alasan utama perusahaan menerapkan *Good Corporate Governance* adalah kepatuhan terhadap peraturan. Perusahaan meyakini bahwa implementasi GCG merupakan bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan, dan implementasi GCG berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan. Perusahaan yang mempraktikkan GCG, akan mengalami perbaikan citra, dan peningkatan nilai perusahaan. salah satu faktor pendukung dalam menambah nilai suatu perusahaan adalah dengan menerapkan sistem *Good Corporate Governance* (GCG).



Menurut Wibowo (2012) Rendahnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia berdampak pada rendahnya daya saing produk dan daya saing perusahaan-perusahaan di Indonesia. Rendahnya daya saing perusahaan-perusahaan Indonesia tidak terlepas dari budaya organisasi.

Wilson (2011) mengatakan perlu dibangun paradigma baru tentang pengelolaan perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Lemahnya penerapan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan di Indonesia merupakan salah satu penyebab lemahnya perekonomian bangsa kita, hal ini bisa dilihat dari lemahnya penerapan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan di Indonesia.

Melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN, BUMN didorong untuk wajib menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan menjadikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai landasan operasionalnya.

Untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan perlu dilakukan suatu penilaian atau pengukuran. Fungsi dari penilaian atau pengukuran kinerja adalah sebagai alat bantu bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan, juga untuk memperlihatkan kepada investor maupun pihak-pihak yang berkepentingan bahwa perusahaan memiliki kredibilitas yang baik.

Menurut Adiyatna dan Marimin (2001), efektivitas berkaitan dengan kinerja dalam pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya. Penilaian kinerja perusahaan dapat diukur melalui aspek keuangan

dan non keuangan. Dalam mencapai kinerja yang diinginkan tidak terlepas dari kemampuan dan perilaku karyawan terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut.

Kinerja perusahaan ditentukan sejauh mana keseriusannya dalam menerapkan *Good Corporate Governance*. Perusahaan yang terdaftar dalam skor pemeringkatan *corporate governance* yang dilakukan oleh IICG telah menerapkan *good corporate governance* dengan baik dan secara langsung menaikkan nilai sahamnya. Semakin tinggi penerapan *corporate governance* yang diukur dengan *Corporate Governance Indeks perception* semakin tinggi pula tingkat ketaatan perusahaan dan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik.

Dengan demikian, *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal; yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2002) mengatakan bahwa “Tujuan utama *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau *stakeholders*”.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis memilih judul skripsi ini, yaitu :

“Pengaruh Penerapan Prinsip Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Perusahaan Pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero)”

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana pengaruh penerapan prinsip prinsip GCG terhadap kinerja perusahaan pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero) ?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan diajukan oleh penulis adalah :

Untuk mengetahui apakah penerapan prinsip prinsip GCG berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan di PT Industri Kapal Indonesia (Persero).

I.4. Manfaat Peneliitian

Sedangkan manfaat bagi penelitian ini adalah :

- a. Bagi perusahaan, khususnya pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero) diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran bagi pihak *stakeholders* dalam menerapkan keefektivitasnya Prinsip - prinsip GCG terhadap kinerja perusahaan.
- b. Bagi dunia pendidikan, khususnya di lingkup Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar, diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan referensi bagi yang tertarik dalam mengetahui Prinsip prinsip GCG.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan dinyatakan pertama kali oleh Jensen and Meckling pada tahun 1976 dalam Anton (2012). Jensen and Meckling menyebut manajer suatu perusahaan sebagai “agen” dan pemegang saham sebagai “principal”. Pemegang saham mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan agen atau perwakilan dari pemegang saham. Permasalahan yang kemudian muncul adalah bahwa agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik prinsipal. Suatu konflik agensi dapat terjadi jika terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan para manajernya, sehingga dapat menyebabkan adanya asimetri informasi yang dikarenakan pemilik perusahaan (*principal*) tidak ikut berperan aktif dalam manajemen perusahaan. *Principal* mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan kepada para manajer profesional (*agent*) untuk melakukan pekerjaan atas nama dan untuk kepentingannya. Delegasi otoritas ini menyebabkan para manajer memiliki insentif untuk membuat keputusan-keputusan strategis, taktikal dan operasional yang dapat menguntungkan mereka, sehingga muncul konflik agensi (*agency conflict*) yang sulit diselaraskan.

Menurut Jensen dan Meckling dalam Pramuka (2007) “Potensi konflik kepentingan dapat terjadi di antara pihak-pihak yang berhubungan seperti antara pemegang saham dengan manajer perusahaan (*agency cost of equity*) atau antara

pemegang saham dengan kreditur (*agency costs of debt*). Jensen dan Meckling juga menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik diantara pihak-pihak yang berkepentingan.

Sedangkan Anthony dan Govindarajan (2010) mendefinisikan bahwa “Teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. (...) bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*”.

Teori agensi sangat sulit untuk diterapkan dan memiliki banyak kendala serta masih belum memadai, sehingga diperlukan suatu konsep yang lebih jelas mengenai perlindungan terhadap para *stakeholders*. Konsep tersebut harus berhubungan dengan masalah-masalah konflik kepentingan dan biaya-biaya agensi yang timbul, sehingga berkembang suatu konsep baru yang memperhatikan dan mengatur kepentingan-kepentingan para pihak terkait dengan kepemilikan dan pengoperasional (*stakeholders*) suatu perusahaan, yaitu konsep *corporate governance*.

Teori keagenan merupakan dasar untuk memahami *corporate governance*. Sehingga teori agensi menjadi dasar pemikiran bahwa kinerja perusahaan yang lebih baik dapat dicapai karena adanya *good corporate governance* (Haat, et al. 2008). Hubungan teori keagenan dengan penelitian ini yaitu bahwa kinerja suatu perusahaan yang baik akan dicapai karena pada kenyataan terdapat praktek-praktek pemerintahan yang baik juga. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan pemantauan dan perlindungan yang lebih baik kepada para pemegang sahamnya .

Herawaty (2008) menjelaskan bahwa “*Corporate Governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, sehingga diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima pengembalian atas dana yang diinvestasikan”.

Menurut Shleifer dan Vishny (1997) dalam Prastya (2013)

Corporate Governance berkaitan dengan bagaimana investor memiliki keyakinan bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi investor dan yakin bahwa manajer tidak akan menggelapkan, atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan yang berkaitan dengan dana atau modal yang telah ditanamkan oleh investor, serta berkaitan dengan bagaimana seorang investor mengendalikan para manajer.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa *Corporate governance* didasari oleh *teori agency* yang menyatakan bahwa setiap individu cenderung untuk memaksimalkan utilitasnya. Konsep *Agency Theory* adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agen principal memperkerjakan agen untuk melakukan tugas dalam rangka memenuhi kepentingan principal.

2.1.2 Good Corporate Governance (GCG)

1. Definisi Good Corporate Governance (GCG)

Corporate Governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta urusan-urusan perusahaan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan, dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain (Malaysian Finance Committee on Corporate Governance February, 1999 dalam Haat, 2008).

Selain itu, *Corporate Governance* didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan suatu perusahaan (FCGI, 2002).

Menurut Zarkasyi (2008:12) dalam Jayanri dan Tri (2016), mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai :

Good Corporate Governance (GCG) pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut dan mencegah terjadinya kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan *corporate governance* sebagai :

Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat lunak untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Corporate governance* yang baik dapat menjadi rangsangan bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya yang lebih efisien.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dalam Hery (2010) mendefinisikan *corporate governance* sebagai :

Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Sutedi (2011:1) dalam Violetta mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai :

Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Price Waterhouse Coopers dalam Indra Surya dan Ivan Yustiavanda (2008)

mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut :

Corporate Governance terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien dan efektif dalam mengelola resiko dan bertanggungjawab dengan memerhatikan kepentingan *stakeholders*.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 dalam Indra Surya dan Ivan Yustivanda (2008) *Good*

Corporate Governance adalah :

Good Corporate Governance adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006) menyatakan bahwa “*corporate governance* (...) digunakan oleh organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders*(....)”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan:

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan Para Stakeholder lainnya.

2. Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang:
pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.

2. Prinsip Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Sutedi (2011), ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *Corporate Governance*, yaitu :

- a. *Transparency* (Keterbukaan), yaitu penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada stakeholders harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya.
- b. *Accountability* (Dapat Dipertanggungjawabkan), Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (*oversight*) dan pengawasan.
- c. *Fairness* (Kesetaraan), yaitu secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.
- d. *Sustainability* (Kelangsungan), kelangsungan adalah bagaimana perusahaan dapat terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Ketika perusahaan negara (*corporation*) exist dan menghasilkan keuntungan dalam jangka mereka juga harus menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya agar tetap bisa bertahan dan berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan hukum, memperlakukan pekerja secara adil, dan menjadi karyawan yang baik. Dengan demikian, akan menghasilkan keuntungan yang lama bagi *stakeholder*-nya.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 pasal 3 tentang penerapan praktik *corporate governance* meliputi lima prinsip yaitu:

1. **Transparency (Transparansi)**, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. **Akuntabilitas (Accountability)**, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. **Pertanggungjawaban (Responsibility)**, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. **Kemandirian (Independency)**, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. **Keadilan (Fairless)**, yaitu Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran.

Sedangkan prinsip-prinsip dasar penerapan *Good Corporate Governance* yang dikemukakan oleh *Center for Good Corporate Governance* Universitas Gadjah Mada (CGCG-UGM) dalam (Anton,2012) adalah sebagai berikut:

- 1.**Transparency (Transparansi)**; dalam menjalankan fungsinya, semua partisipan harus menyampaikan informasi yang material sesuai dengan substansi yang sesungguhnya dan menjadikan informasi tersebut dapat diakses dan dipahami secara mudah oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan.

2.Accountability (Pertanggungjawaban); dalam menjalankan fungsinya, setiap partisipan CG harus mempertanggungjawabkan amanah yang diterima sesuai dengan hukum, peraturan, standar moral dan etika, maupun best practise yang berterima umum.

3. Responsiveness (Ketanggapan); dalam menjalankan fungsinya, setiap partisipan CG harus tanggap dan antisipatif terhadap permintaan (*request*) maupun umpan-balik (*feedback*) dari pihak-pihak yang berkepentingan dan terhadap perubahan-perubahan dunia usaha yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan.

4.Independency (Independensi); dalam menjalankan fungsinya, setiap partisipan harus bebas dari kepentingan pihak-pihak lain yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan, dan menjalankan fungsinya sesuai dengan kompetensi yang memadai.

5.Fairnes (Keadilan); dalam menjalankan fungsinya, setiap partisipan memperlakukan pihak lain berdasarkan ketentuanetentuan yang berterima umum dan secara adil.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat yang diberikan kepada perusahaan, dan perusahaan juga harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, serta ras.

3. Tujuan Good Corporate Governance (GCG)

Tujuan dari penerapan *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Tjager, et.al., (2003) dalam Anton (2013), menyatakan bahwa secara teoritis, pelaksanaan *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri mereka sendiri dan umumnya, *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor

Terdapat enam tujuan dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN dalam (Pieris dan Jim, 2007 : 144)

- a. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
- b. Meningkatkan investasi nasional.
- c. Turut mensukseskan program privatisasi.
- d. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara membangun prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
- e. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian.
- f. Mendorong agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.

4. Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari penerapan *Corporate Governance*, menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FGCI) (2004:4), antara lain :

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan *dividen*.

2.1.3 Kinerja Perusahaan

1. Definisi Kinerja Perusahaan

Setiap perusahaan pasti selalu meninjau kinerja dari perusahaan tersebut dalam periode tertentu. Kegiatan ini sering juga disebut dengan Kinerja Perusahaan. Kinerja perusahaan memiliki pengertian sebagai hasil dari kegiatan manajemen di sebuah perusahaan. Hasil dari kinerja manajemen ini kemudian dijadikan sebuah parameter atau tolak ukur untuk menilai keberhasilan

manajemen sebuah perusahaan dalam hal pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan dalam periode tertentu.

Simanjuntak mendefinisikan kinerja perusahaan adalah “Kinerja perusahaan atau organisasi adalah tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang harus dicapai oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu”.

Menurut Cahyani (2009) dalam Jayanri dan Tri (2016), “Kinerja perusahaan pada dasarnya adalah suatu pencapaian yang dihasilkan atau hasil kerja yang dicapai dari suatu usaha. Pengertian kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijaksanaan(....)”.

Moerdiyanti (2010) mengungkapkan bahwa “kinerja perusahaan adalah hasil dari serangkaian proses bisnis yang mana dengan pengorbanan berbagai macam sumber daya (...) Keuntungan atau laba yang dihasilkan tentu akan berbeda tergantung dalam ukuran perusahaan yang bergerak”.

Sedangkan menurut Chariri dan Ghazali mengenai pengukuran kinerja perusahaan bahwa “Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menggunakan informasi keuangan atau juga menggunakan informasi non keuangan”.

Jadi, kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam suatu periode tertentu.

2. Penilaian Kinerja Perusahaan

Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi pada umumnya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam usaha untuk memenuhi kepentingan para

anggotanya. Keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan merupakan prestasi manajemen. Penilaian kinerja merupakan proses menilai hasil karya personal dalam suatu organisasi melalui instrumen penilaian kinerja, yang pada hakikatnya hal ini merupakan suatu evaluasi terhadap penampilan kerja personal dengan membandingkan standar baku penampilan. Melakukan penilaian kinerja akan membantu organisasi dalam memutuskan keputusan atas umpan balik atas pelaksanaan kinerja.

Menurut (Hall, 1986 dalam Ilyas, 2002: 87), “Penilaian kinerja merupakan proses yang berkelanjutan untuk menilai kualitas kerja personal dan usaha untuk memperbaiki kerja personal dalam organisasi”. Dengan melakukan penilaian kinerja organisasi dapat mengetahui uraian pekerjaan yang telah dirumuskan sebelumnya, pimpinan akan mengetahui tolak ukur dari uraian kinerja tersebut. Produktivitas terganggu bila karyawan dan manajer tidak memiliki kesamaan standar kinerja. Mengungkapkan penyebab-penyebab dasar dari buruknya kinerja adalah suatu fungsi penting tetapi sering diabaikan dalam proses penilaian kinerja. Pertemuan penilaian kinerja tidak boleh dilakukan jika hanya dilihat sebagai upaya bertukar informasi karena seharusnya berfungsi sebagai peluang untuk mengejar penyebab-penyebab kinerja dan mengambil tindakan - tindakan yang tepat.

Mempertemukan sudut pandang karyawan dan manajer akan membantu kedua pihak untuk mengetahui seluruh konteks pekerjaan dan masalah yang ada. Maka untuk itu menurut (Timpe, 1999: 237) ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk melakukan penilaian kinerja :

1. Menganalisis pengkajian kinerja.
2. Membandingkan kinerja baik dan buruk.
3. Mendokumentasikan butir - butir penting.

Penilaian kinerja dimulai dengan pengumpulan data kinerja para pegawai sepanjang masa evaluasi kinerja. Penilaian kinerja dilakukan dengan dua metode yaitu secara formatif adalah penilaian kinerja para karyawan ketika para karyawan sedang melakukan tugasnya, hal ini bertujuan untuk melihat ketimpangan antara kinerja karyawan dengan standar kerjanya pada waktu tertentu dan penilaian sumatif adalah penilaian pada akhir periode penilaian, membandingkan kinerja akhir karyawan dengan standar kerjanya dan kemudian mengisi instrumen evaluasi kinerja.

Berdasarkan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja memerlukan indikator-indikator penilaian yang dipengaruhi oleh berbagai faktor apakah faktor internal ataupun faktor eksternal dengan beragam aspek yang dapat diukur dengan berpedoman pada standar tertentu yang terdiri dari aspek kuantitatif dan aspek kualitatif yang berguna untuk mendapatkan *feedback* guna keperluan perbaikan organisasi secara khusus manajemen pengelolaan sumber daya baik dari aspek keuangan maupun nonkeuangan.

3. Tujuan Penilaian Kinerja Perusahaan

Penilaian kinerja perusahaan dilakukan bertujuan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang ditetapkan sebelumnya agar tercapai tujuan perusahaan yang baik.

Melalui penilaian kinerja, maka perusahaan dapat memilih strategi dan struktur keuangannya.

Adapun penilaian kinerja perusahaan sering dilakukan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk keperluan merger dan akuisisi. Perusahaan akan melakukan merger (penggabungan usaha) atau mengakuisisi perusahaan lain, jelas memerlukan kegiatan penilaian untuk mengetahui berapa nilai perusahaan dan nilai ekuitas dari masing-masing perusahaan.
- b. Untuk kepentingan restrukturisasi dan kepentingan usaha. Perusahaan yang bermasalah seringkali memerlukan penilaian untuk mengimplementasikan program pemulihan usaha atau restrukturisasi, untuk mengetahui apakah nilai usaha lebih besar daripada nilai likuiditasnya.
- c. Untuk keperluan divestasi sebagai saham perusahaan dari mitra strategis (beberapa saham harus dilepas kepada mitra baru). Contoh: privatisasi BUMN.
- d. Untuk Initial Public Offering (IPO). Perusahaan yang akan menjual sahamnya pada umum atau bursa, harus dinilai dengan menggunakan penilaian yang wajar untuk ditawarkan kepada masyarakat atau publik.
- e. Untuk memperoleh pendapatan wajar atas penyertaan dalam suatu perusahaan atau menunjukkan bahwa perusahaan bernilai lebih dari apa yang ada di dalam neraca.
- f. Memperoleh pembelanjaan penetapan besarnya pinjaman atau tambahan modal.

4. Manfaat Penilaian Kinerja Perusahaan

Penilaian kinerja sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan suatu organisasi. Melalui penilaian tersebut, maka dapat diketahui dan dijadikan pertimbangan hasil dari kinerja dalam proses pengambilan keputusan. Adapun manfaat dari penilaian kinerja perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Perbaiki seluruh simpul unit-unit yang ada dalam perusahaan, meliputi : komunikasi, peningkatan rasa kebersamaan (*royalitas*), peningkatan kemampuan dan kemauan manajer untuk menggunakan keterampilan atau keahlian memimpinya dan memotivasi karyawan.
- b. Meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang dilakukan oleh masing-masing karyawan
- c. Meningkatkan kualitas komunikasi
- d. Meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan
- e. Meningkatkan keharmonisan hubungan dalam pencapaian tujuan perusahaan
- f. Peningkatan dalam segi pengawasan
- g. Harapan dan pandangan jangka panjang dapat dikembangkan
- h. Untuk mengenali lebih jelas pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan
- i. Kemampuan menemukan dan mengenali setiap permasalahan
- j. Sebagai sarana penyampaian pesan bahwa karyawan tersebut dihargai oleh perusahaan
- k. Kejelasan dan ketetapan dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan oleh karyawan, sehingga perusahaan dapat tampil prima
- l. Budaya perusahaan menjadi mapan
- m. Karyawan lebih potensial dan memungkinkan mendapatkan promosi jabatan.

2.1.4 Dewan Komisaris

Komisaris merupakan organ yang mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi. Di Indonesia, dewan komisaris merupakan organ yang bersifat pasif dan tidak dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif terhadap direksi. Atau sebaliknya, peran komisaris yang terlalu kuat dalam perusahaan, sehingga seringkali melakukan intervensi terhadap kebijakan direksi.

Dewan komisaris memegang peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian daripada pencapaian tujuan perusahaan. Yang terpenting dalam hal ini adalah kemandirian komisaris dalam pengertian bahwa dewan komisaris harus memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur tangan manajemen, dilengkapi dengan informasi yang memadai untuk mengambil keputusan, dan berpartisipasi secara aktif dalam penetapan agenda dan strategi. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

2.1.5 Dewan Direksi

Bismar menyatakan bahwa “Istilah pengelolaan perusahaan digunakan untuk menggambarkan peran dewan direksi. Dewan direksi merupakan agen para pemegang saham untuk memastikan perusahaan dikelola guna kepentingan perusahaan tersebut”.

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. “Jumlah anggota dewan (baik dewan direksi maupun dewan komisaris) yang besar semakin menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resource dependence*” (Goodstein, Gautarn, Boeker, 1994). Maksud dari pandangan *resource dependence* adalah bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik.

Sedangkan kerugian dari jumlah dewan yang besar berkaitan dengan dua hal, yaitu : meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan semakin meningkatnya jumlah dewan dan turunnya kemampuan dewan untuk mengendalikan manajemen, sehingga menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara manajemen dan kontrol (Yemack,1996)

2.1.6 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Jumlah komisaris independen dalam satu perusahaan ditetapkan paling sedikit 30% dari jumlah seluruh komisaris (Gusti : 2011).

Berdasarkan *The National Committee on Corporate Governance* (2000) dalam Siswantaya (2007:17) menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan dewan komisaris. Di antaranya adalah fungsi dewan komisaris untuk mengawasi

direksi baik yang berhubungan dengan kebijakan dan pelaksanaan direksi. Kedua, dewan komisaris berfungsi untuk memberikan saran kepada direksi. Untuk menjalankan fungsi tersebut, maka anggota dewan komisaris merupakan seorang yang berkarakter baik dan memiliki pengalaman yang relevan. Wardhani (2007:99) mengatakan bahwa, “Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem *two tier*, (...) Dewan komisaris merupakan pihak yang melakukan fungsi *monitoring* terhadap kinerja manajemen, sedangkan dewan direksi merupakan pihak yang melakukan fungsi operasional perusahaan”.

2.1.7 Komite Audit

Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip – prinsip GCG. Komite audit ini dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Anggota komite audit diharuskan memiliki keahlian yang memadai. Komite audit ini memiliki kewenangan dan fasilitas untuk mengakses data perusahaan.

Menurut Hasnati (2013 : 20) “Komite audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris. Anggota komite audit dapat berasal dari kalangan luar(...) Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor dan hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris”.

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Effendi (2009) mendefinisikan komite audit sebagai berikut :

Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan

(oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan – perusahaan.

Komite audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan good corporate governance karena merupakan “mata” dan “telinga” dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi GCG. Untuk mewujudkan prinsip GCG di suatu perusahaan publik, maka prinsip-prinsip GCG harus menjadi landasan utama bagi aktivitas komite audit.

2.1.8 Pengaruh Penerapan Prinsip GCG Terhadap Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan ditentukan sejauh mana keseriusannya dalam menerapkan *Good Corporate Governance*. Perusahaan yang terdaftar dalam skor pemeringkatan *Corporate Governance* yang dilakukan oleh IICG telah menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik dan secara langsung menaikkan nilai sahamnya. Semakin tinggi penerapan *Corporate Governance* yang diukur dengan *Corporate Indeks Perception* semakin tinggi pula tingkat ketaatan perusahaan dan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik dan efektif.

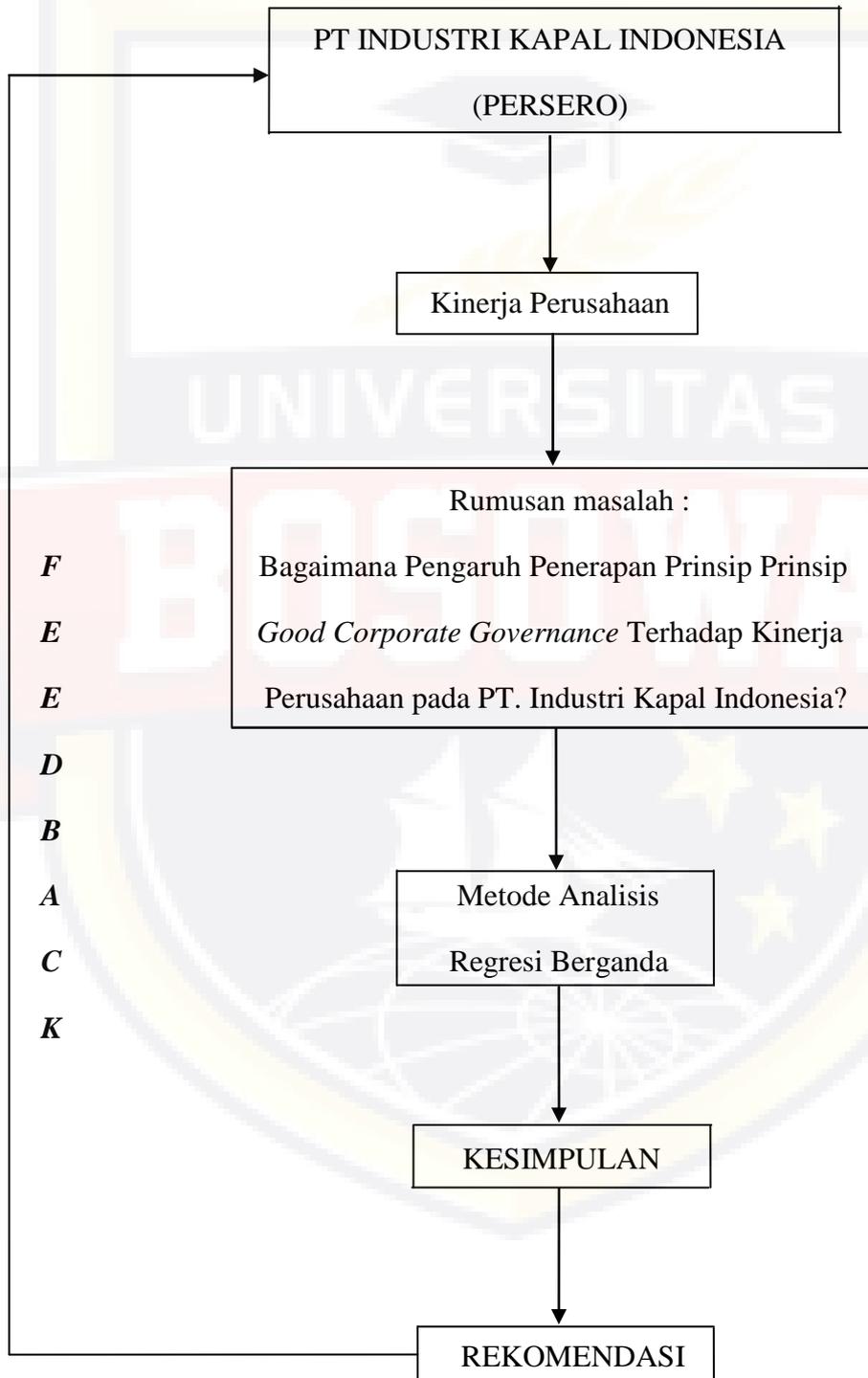
Pengaruh penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan menurut Xiaonian, et.al., 2000 dalam Purwani (2010) adalah:

pemegang saham saat ini sangat aktif dalam meninjau kinerja perusahaan karena mereka menganggap bahwa *Good Corporate Governance* yang lebih baik akan memberikan imbalan baik yang lebih tinggi bagi mereka. Penerapan *Good Corporate Governance* yang baik berfokus pada proses manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif akan meningkatkan kinerja dan daya saing serta kreativitas nilai perusahaan yang pada nantinya akan mencapai tujuan yang diinginkan.

Secara teoritis praktik, *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya *Good Corporate*

Governance dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya.

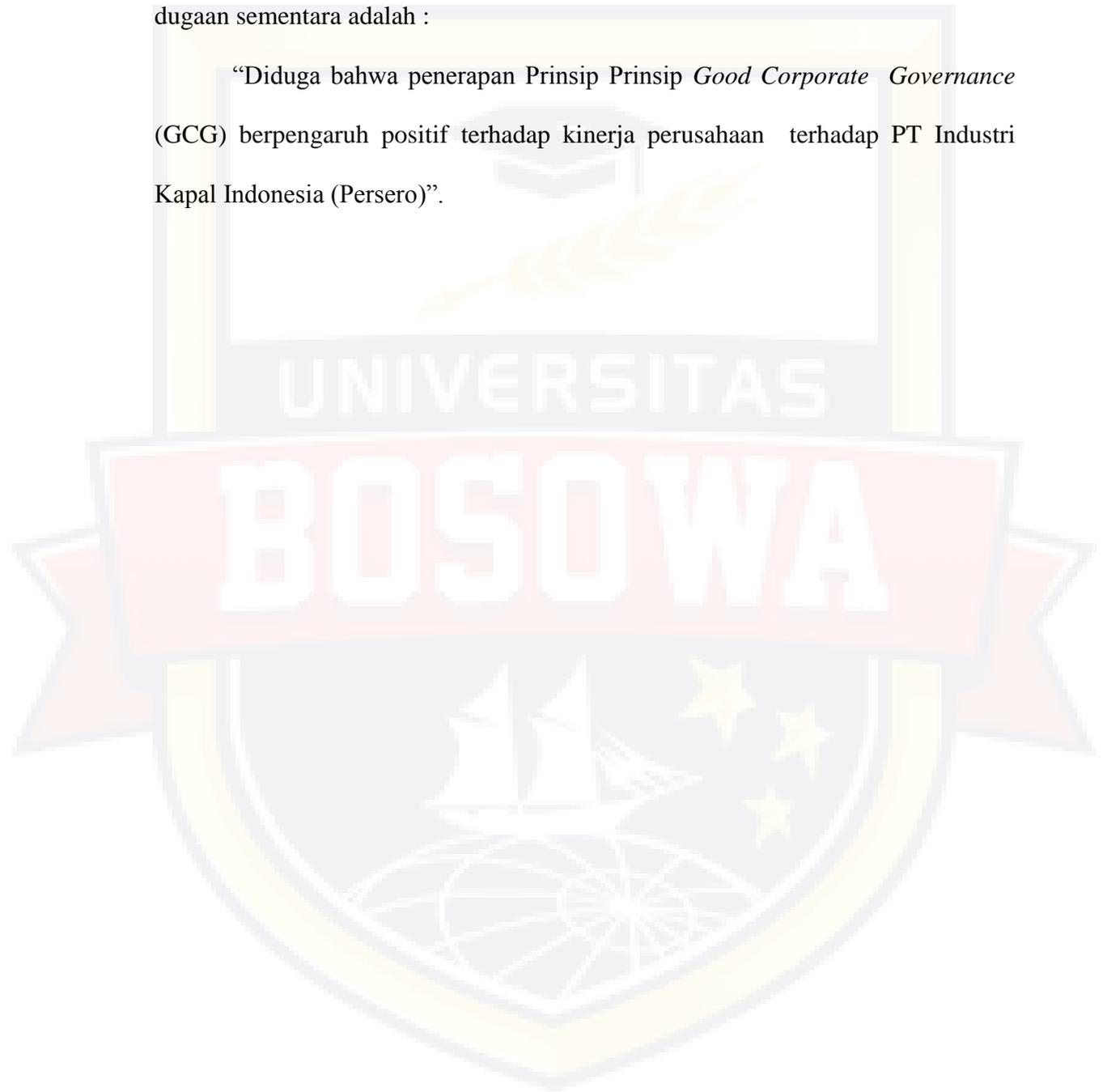
2.2 Kerangka Pikir



2.3 Rumusan Hipotesis

Berdasarkan masalah pokok yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dugaan sementara adalah :

“Diduga bahwa penerapan Prinsip Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan terhadap PT Industri Kapal Indonesia (Persero)”.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Daerah Penelitian dan Waktu Penelitian

Lamanya proses pengumpulan data dan penelitian yang akan direncanakan adalah selama 2 (dua) bulan, yaitu bulan Mei sampai Juni 2018.

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero) yang terletak di Jalan Galangan Kapal Nomor 31 Makassar.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan dua metode sebagai berikut :

- a. Studi dokumentasi, yaitu penelitian yang akan dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap laporan tahunan (objek) yang akan diteliti. Data tersebut diperoleh langsung dari PT Industri Kapal Indonesia (Persero). Sumber-sumber data seperti laporan tahunan perusahaan akan menjadi sampel penelitian.
- b. Studi pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literature yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah penulis. Hal ini dimaksudkan agar dapat menjadi sumber acuan untuk membahas teori yang mendasari pembahasan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diperoleh dari koesioner sebagai data primer serta data sekunder yang diperoleh melalui sumber yang sudah ada.

Data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini adalah laporan tahunan (*annual report*) perusahaan tercatat periode 2015-2016. Data tersebut diperoleh dari PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar.

3.4 Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda. Analisis Regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Analisis regresi berkenaan dengan studi ketergantungan suatu variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas atau penjelas, dengan tujuan menestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.

$$y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan :

y = variabel terikat (Kinerja Perusahaan)

α = nilai konstanta

β = nilai koefisien regresi

X_1 = variabel bebas keterbukaan

X_2 = variabel bebas Akuntabilitas

X_3 = variabel bebas Pertanggungjawaban

X_4 = variabel bebas Indenpendensi

X_5 = variabel bebas Keadilan

e = eror

3.5 Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum. Analisis statistik deskriptif di gunakan untuk mengetahui gambaran mengenai karakteristik umum pada perusahaan PT Industri Kapal Indonesia (Persero).

3.5.2 Uji Asumsi Normalitas

Pengujian ini untuk mengetahui apakah variabel pengujian terdistribusi normal atau tidak. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal.

Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi normal.

3.5.3 Uji Asumsi Multikolonieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar satu atau semua variabel bebas (*independent*). Ada tidaknya masalah multikolienaritas dalam regresi dapat dilihat dengan nilai *Variance Inffactor Factor (VIF)* yang kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10

3.5.6 Uji Hipotesis

a. Uji T

Uji t digunakan untuk menguji secara persial apakah setiap variabel bebas (*independent*) memiliki pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat (*dependent*).

Jika probabilitas nilai t atau signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial.

Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi $> 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat

b. Uji F

Penelitian ini menggunakan uji F karena digunakan untuk menguji hipotesis yang menunjukkan apakah semua variabel independen dalam penelitian secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan level signifikansi $> 0,05$.

Dalam pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pengujian yaitu :

1. Jika terdapat nilai signifikan $\leq 0,05$ maka koefisien regresi bersifat signifikan dan simultan variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika terdapat nilai signifikansi $> 0,05$ maka berarti bahwa secara simultan variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.6 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atau variabel yang diamati. Secara tidak langsung, definisi operasional itu mengacu pada bagaimana mengukur suatu variabel. Definisi operasional dalam penelitian ini perlu dikemukakan untuk menghindari perbedaan antara penulis dan pembaca. Variabel dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu variabel independen

(bebas) dan variabel dependen (terikat). Penelitian ini mempunyai 5 (lima) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen.

Adapun pengertian dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* diharapkan dapat dijadikan acuan bagi perusahaan. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ada 5 (lima), yaitu :

a. *Transparancy* (Keterbukaan)

Tranparansi adalah adanya pengungkapan yang akurat, tepat pada waktunya dan mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku serta tranparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan kepemilikan, serta pemegang kepentingan.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas menekan pada pentingnya penciptaan system pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk menyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban adalah adanya tanggungjawab penguna dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

d. *Independency* (Independensi)

Untuk melancarkan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. *Fairness* (Keadilan)

Keadilan merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi setiap pihak yang berkepentingan akan mendapatkan perilaku adil, serta dapat menggunakan haknya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2. Kinerja Perusahaan (Variabel Y)

Setiap perusahaan pasti selalu meninjau kinerja dari perusahaan tersebut dalam periode tertentu. Kegiatan ini sering juga disebut dengan Kinerja Perusahaan. Kinerja perusahaan memiliki pengertian sebagai hasil dari kegiatan manajemen di sebuah perusahaan. Hasil dari kinerja manajemen ini kemudian dijadikan sebuah parameter atau tolak ukur untuk menilai keberhasilan manajemen sebuah perusahaan dalam hal pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan dalam periode tertentu.

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam suatu periode tertentu.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pada tahun 1962 di Makassar telah dibangun dua buah proyek galangan kapal yang masing-masing adalah proyek galangan kapal Paotere dan galangan kapal Tallo. Proyek galangan Paotere pada waktu itu dibangun oleh Departemen Perindustrian dan Pertambangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk membangun kapal-kapal baja dengan bobot 2500 ton, sedangkan proyek galangan kapal Tallo yang waktu itu dibangun oleh departemen Urusan Veteran dan Demobilisasinya dimaksudkan untuk kapal-kapal kayu yang berbobot 300 ton, akan tetapi proyek ini memiliki slipway (Fasilitas untuk menaikkan dan menurunkan kapal dari daratan ke laut) yang panjangnya 45 meter dan mempunyai daya angkat 500 LT.

Pada pertengahan tahun 1963 kegiatan kedua proyek tersebut baru sampai pada taraf pekerjaan dasar, dimana pada waktu itu galangan kapal paotere memiliki fasilitas atau peralatan yang didatangkan dari polandia yang sekarang bernama PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar. Sehubungan terbatasnya biaya maka pemerintah memutuskan menggabungkan kedua proyek tersebut dengan melihat keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan, juga karena kedua galangan tersebut hanya berjarak 2 km, dengan dibawah oleh Depatemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan serta sepakat merubah namanya menjadi proyek galangan kapal Makassar dan dengan keputusan presiden RI No.225/163 proyek ini dikatakan proyek Vital.

Dengan terjadinya penggabungan tersebut, maka :

1. Lokasi bekas proyek galangan kapal Tallo dipindahkan berdampingan dengan bekas proyek galangan kapal Paotere.
2. Mengadakan *redesigning* yang disesuaikan dengan biaya yang ada dan menitikberatkan pada penyelesaian tahap pertama (bekas proyek galangan kapal) dengan sasaran utama memperbaiki dan memelihara kapal-kapal sampai dengan 500 ton.
3. Menunda pembangunan bekas diteruskan penyelesaiannya pada tahap kedua (rencana perusahaan).

Akhirnya setelah mengalami masa pembangunan selama lebih dari 7 tahun maka tepat pada tanggal 30 maret 1970 penyelesaian dan pemakaian galangan kapal Makassar tahap pertama diresmikan oleh Sekjen Departemen Perindustrian yang pada saat itu diwakili Menteri.

Sistem docking dan kapasitas galangan kapal Makassar ini mempunyai slipway horisontal dan miring, dengan sebuah shiper besar untuk menaikkan dan menurunkan kapal dari daratan air, dan setelah kapal didaratkan maka kapal dapat ditarik kesamping kesalah satu side track (normal) panjang shifter tersebut maksimum 45 meter dan mempunyai daya angkat 500 ton, tinggi air diatas shifter maksimum 3,40 ton meter, disebelah barat dari shifter terdapat area yang sangat luas untuk melihat kapal tersebut. Sedangkan disebelah barat dari slipway horisontal terdapat empat side track yang panjang masing-masing 140 meter dua buah, dan 70 meter juga dua buah dengan kapasitas 500 ton. Sedangkan disebelah timur slipway horisontal ada dua side track yang panjangnya 50 meter dengan kapasitas 300 ton.

Dengan peralatan dan fasilitas yang dimiliki oleh galangan kapal Makassar sekarang ini telah mampu membuat kapal baru yang berukuran besar sampai dengan ukuran diatas 1.500 DWT serta memperbaiki atau memelihara kapal yang panjangnya sampai dengan 55 meter atau kapal-kapal yang bobotnya 500 ton kebawah kurang dari 60 buah pertahun juga kapal-kapal yang berukuran lebih besar dari itu, serta mempunyai fasilitas daya tampung 5-16 buah sekaligus ukuran seperti yang tersebut diatas dan pada waktu sekarang ini galangan kapal juga membuat kapal-kapal kayu seperti kapal kayu laminasi yang mana dikerjakan sesuai pesanan. Sesuai dengan tingkat dan kondisi kegiatan yang dihadapi oleh galangan kapal ini, tenaga kerja yang mampu diserap secara keseluruhan kurang lebih 500 orang.

Semenjak tahun 1970 sampai dengan oktober 1997 galangan kapal ini masih mempunyai status sebagai proyek vital. Pada tahun 29 oktober 1997 didepan notaris, didirikan suatu PT. Industri Kapal Indonesia (persero) yang pada mulanya mencakup 4 golongan yaitu :

1. Galangan kapal Gresik (Jawa Timur)
2. Galangan Kapal Padang (Sumatera Barat)
3. Galangan Kapal Makassar (Sulawesi Selatan)
4. Galangan Kapal Bitung (Sulawesi Utara)

Jadi jelas disini bahwa galangan kapal Makassar sekarang telah menjadi satu unit produksi dari PT. Industri Kapal Indonesia (Persero).

Dalam tahun 1996 unit galangan kapal padang telah dialihkan pengelolaannya pada PT. Koja Jakarta dan dalam tahun 1988 produksi galangan

kapal Gresik juga telah dialihkan pengelolaanya ke PT. Industri Kapal Indonesia (Persero), hal ini sesuai dengan kebijakan Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan.

Rencana perluasan direncanakan oleh pemerintah dengan mendirikan 4 pusat industri kapal di seluruh Indonesia, yaitu Palembang, Jakarta, Surabaya dan Makassar. Makassar dimaksudkan sebagai pusat industri perkapalan untuk seluruh wilayah Indonesia Timur. Dengan mendirikan pusat tersebut, maka diharapkan dan diusahakan mendirikan industri-industri pembantu seperti industri-industri pembuatan komponen-komponen kapal (peralatan-peralatan kapal, perlengkapan kapal serta lain sebagainya yang ada hubungannya dengan perlengkapan) seperti sub kontroler dan lain sebagainya.

Kondisi umum dok dan galangan kapal mengalami pululan berat tahun 1985-1989 dan hampir semua galangan kapal mengalami kerugian yang cukup besar. Demikian juga dok PT Industri Kapal Indonesia (Persero). Pada tahun itu produksi dan penjualannya mengalami penurunan yang cukup tajam, sehingga mengakibatkan konfusi keuangan tidak sehat dan tidak dapat memperbaiki sarana produksi sampai pada tahun 1990.

Peningkatan penjualan dan keuntungan mulai didapatkan sehingga akumulasi kerugian sudah mulai diatasi dan sudah dapat memperbaiki modal untuk investasi serta membayar kewajiban yang tertunda. Investasi yang dilaksanakan antara lain mengadakan perbaikan sarana produksi yang telah ada dan meningkatkan kapasitas dari 7 kapal menjadi 15 kapal dan 500 TLS dan 1000 TLC dan jumlah unit kapal secara bersamaan dapat direparasi dengan lebih cepat.

Membangun secara bertahap Graving Dock dengan kapasitas 6000 DWT dan Building Berth dengan kapasitas 8000 DWT serta penambahan kapasitas pendukungnya agar dapat mereparasi kapal dan membuat lebih besar. Kemajuan yang telah tercapai oleh perusahaan dewasa ini belumlah sebanding dengan perusahaan sejenisnya yang ada, namun atas usaha kerja keras karyawan dan pimpinan, serta bantuan segenap unsur masyarakat dan pemerintah, maka yakin apa yang menjadi impian dan harapan serta cita-cita perusahaan akan dapat diwujudkan.

Visi dan Misi Perusahaan

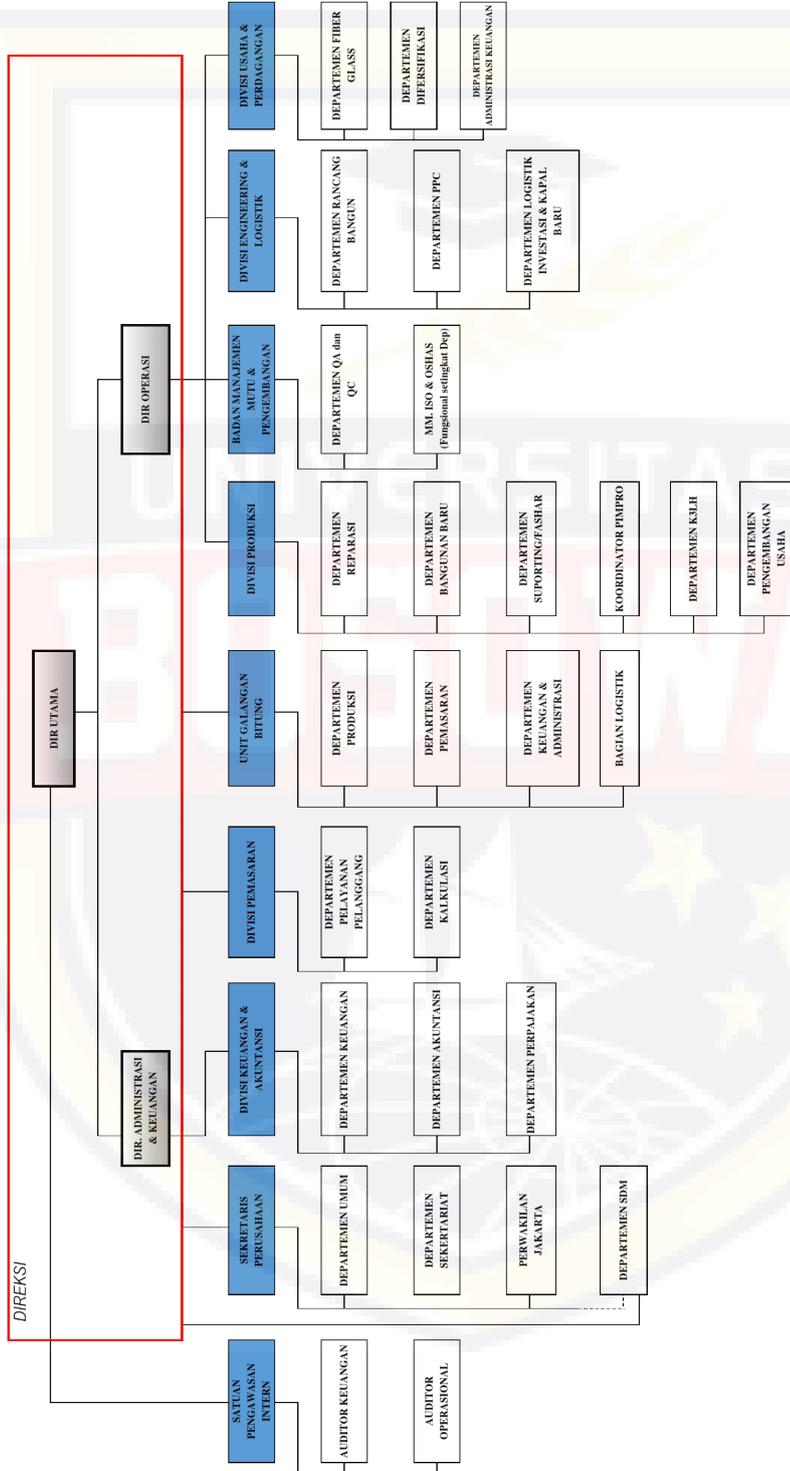
Visi Perusahaan

Menjadi pusat pengembangan Industri Maritim dan perkapalan di kawasan Indonesia timur, serta pusat pengembangan kapal ikan di Indonesia.

Misi Perusahaan

1. Meningkatkan kemampuan perolehan laba dengan cara meningkatkan penjualan dan efisiensi di segala bidang.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan budaya perusahaan (*Culture Corporate*) yang sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi.
3. Menjalankan misi pemerintah sebagai pelopor dan penggerak pembangunan ekonomi, khususnya di bidang maritim atau perkapalan.

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan



Pada gambar 1 disajikan struktur organisasi PT Industri Kapal Indonesia (Persero) yang menunjukkan hubungan atau hierarki dalam perusahaan tersebut tentang komunikasi kerja yang ada untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang pada perusahaan. Dilihat dari struktur organisasinya PT Industri Kapal Indonesia (Persero) menggunakan bentuk organisasi garis dan staf. Dimana bantuan yang diberikan staf hanya berupa nasihat, sedangkan keputusan dan pelaksanaan dari keputusan tersebut tetap berada ditangan pimpinan.

Adapun Dewan Komisaris PT Industri Kapal Indonesia (Persero) pada tahun 2015 sesuai Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor: SK-169/MBU/09/2015 tanggal 09 September 2015 terdiri atas 3 (tiga) orang yaitu:

1. Komisaris Utama : Soerjono
2. Komisaris : Saleh Pallu
3. Komisaris : Yervis M. Pakan

Sedangkan susunan Direksi PT Industri Kapal Indonesia (Persero) pada tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No: SK-108/MBU/06/2016 tanggal 02 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi sebagai berikut :

1. Direktur Utama : Edy Widarto
2. Direktur : Aurelius Larope
3. Direktur : Ahril Abdullah

Namun pada tahun 2017 sesuai Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No: SK-50/MBU/03/2017 pada tanggal 14 Maret 2017

Pemberhentian dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi PT Industri Kapal Indonesia (Persero), susunan anggota Direksi Perseroan mengalami perubahan, sehingga menjadi:

1. Direktur Utama : Edy Widarto
2. Direktur : Suhan Ikhsan
3. Direktur : Ahril Abdullah

4.1.3 Uraian Tugas

Dari bagan struktur organisasi PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) nampak bahwa ada Dewan Komisaris yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan unsur lain.

Setiap bagian dipimpin oleh seorang kepala bagian dan bertanggung jawab pada manajer divisi di atasnya. Adapun uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut :

- a. Direktorat dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan dua orang Direktur yaitu Direktur Produksi dan Direktur Keuangan.
- b. Setiap Biro dipimpin oleh seorang general manager dan bertanggung jawab pada direktorat di atasnya, dan setiap biro membawahi divisi.
- c. Setiap divisi dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab pada general manager.
- d. Setiap bagian dipimpin oleh seorang kepala bagian dan bertanggung jawab pada manajer divisi di atasnya.

Adapun uraian tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris atau RUPS dengan tugas pokok bersama-sama para Direktur menetaokan manajemen dan kebijaksanaan pokok perusahaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
- Direktur Produksi bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan tugas pokok bersama-sama Direktur Utama dan Direktur Keuangan menetapkan kebijaksanaan pokok perusahaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Mengkoordinir, membina dan mengawasi pelaksanaan fungsi-fungsi pemasaran (*marketing*), *Design Engineering* dan produksi secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah digariskan RUPS.
- Direktur Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan tugas mengkoordinir, membimbing dan mengawasi kegiatan bidang keuangan, akuntansi, pergudangan dan perpajakan sesuai dengan penggarisan Direksi dan manual/sistem akuntansi yang berlaku.
- Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab pada Direksi dengan tugas melayani kepentingan direksi dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang meliputi pesiaoan rapat, pelayanan tamu direksi, sebagai notulis rapat, dan pengelola arsip direksi.
- Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertanggung jawab kepada direktur utama dengan tugas melakukan fungsi pemeriksaan intern (*internal auditing*) yaitu mengawasi agar kebijaksanaan perusahaan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh direksi dilaksanakan sebagaimana mestinya, meneliti sebab-sebab terjadinya penyimpangan dan mengusulkan langkah-langkah perbaikan.

- Staf Ahli/Asisten bertanggung jawab kepada direksi dengan tugas memasuki dan meminta data serta keterangan yang berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan pengendalian kegiatan yang dilaksanakannya.
- Asisten produksi bertanggung jawab kepada direktur produksi dengan tugas melakukan pengawasan atau kegiatan di bidang produksi maupun logistik untuk tercapainya efisiensi perusahaan dan mengadakan evaluasi terhadap kegiatan proyek yang telah selesai dilaksanakan baik untuk order pekerjaan/nilai penjualan masing-masing order pekerjaan dan investasi yang diadakan perusahaan.
- Kepala Biro *Quality Assurance* dan Kepala Biro *Quality Control* bertanggung jawab kepada direktur utama dengan tugas mengkoordinasikan dan mengawasi mutu pelaksanaan pekerjaan teknis agar sesuai dengan yang direncanakan untuk pekerjaan order bangunan baru, reparasi kapal, pekerjaan sipil, dan pekerjaan non kapal, dan meneliti/memeriksa kontrak/design yang akan dikerjakan berdasarkan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) yang telah disahkan Rapat Pemegang Saham.
- Kepala Biro Perwakilan bertanggung jawab kepada Direksi dengan tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pemasaran untuk kepentingan perusahaan serta tugas yang telah digariskan dalam RKAP yang telah disahkan oleh Rapat Pemegang Saham.
- Kepala Biro Produksi Bangunan Baru bertanggung jawab kepada Direktur Produksi dengan tugas mengerahkan tenaga untuk kegiatan operasional

semaksimal mungkin agar dapat mencapai pedapatan yang telah digariskan dalam RKAP yang telah disahkan oleh Rapat Pemegang Saham.

- Kepala Biro Produksi Reparasi bertanggung jawab kepada direksi produksi dengan tugas mengendalikan dan mengerahkan sarana dan daya untuk pelaksanaan pekerjaan reparasi kapal secara efisien dan efektif.
- Kepala Biro Logistik bertanggung jawab kepada direksi produksi dengan tugas mengkoordinasikan, memimpin dan mengawasi pelaksanaan pembelian peralatan impor maupun lokal untuk kebutuhan unit dan galangan unit lainnyasesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan dan kebijaksanaan direksi berdasarkan RKAP yang telah disahkan oleh Rapat Pemegang Saham.
- Kepala Biro Komersial dan Teknologi bertanggung jawab kepada direktur komersial/keuangan dengan tugas menyusun rencana anggaran penjualan tahunan untuk dasar pembuatan RKAP tahun berikutnya, mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pemasaran dan engineering secara efisien dan efektif.
- Kepala Biro Keuangan dan Akuntansi bertanggung jawab kepada direktur komersial dan keuangan dengan tugas mengkoordinir/membawahi dan mengawasi kegiatan bidang keuangan akuntansi dan perpajakan.
- Kepala Biro Umum/Personalia bertanggung jawab kepada direktur komersial/keuangan dengan tugas mengkoordinir, memimpin dan mengawasi pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan masalah kepegawaian,

ketatausahaan, umum/rumah tangga, kehumasan, hukum dan tugas-tugas umum lainnya.

- Kepala Divisi *Marketing* bertanggung jawab langsung kepada biro komersil dan teknologi dengan tugas mengkoordinasikan, membimbing dan mengawasi kegiatan semua urusan yang berkaitan dengan pemasaran.
- Kepala Divisi Keuangan bertanggung jawab langsung kepada kepala biro keuangan/akuntansi dengan tugas mengkoordinasikan, memimpin dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut masalah akuntansi dan administrasi keuangan agar laporan keuangan dapat disusun tepat waktu sesuai dengan manual akuntansi yang berlaku.
- Kepala Divisi Akuntansi bertanggung jawab langsung kepada kepala biro keuangan/akuntansi dengan tugas mengkoordinasikan, memimpin dan mengawasi pelaksanaan tugas yang menyangkut kegiatan dibidang keuangan dan perpajakan.
- Kepala Divisi *Quality Control* bertanggung jawab kepada manajer unit dengan tugas pokok mengkoordinir, membimbing dan mengawasi kegiatan pengawasan dan penelitian teknis atas pekerjaan pembuatan kapal baru berdasarkan *Network Planning, Production, Schedule*, Pengawasan Mutu serta Waktu Penyelesaian Pekerjaan.

4.1.4 Bidang Usaha Perusahaan

Adapun tujuan didirikannya perusahaan ini sesuai akte perusahaan tersebut adalah untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dan

khususnya di bidang industri perkapalan serta mesin-mesin dan industri logam dasar lainnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan menjalankan kegiatan usaha di bidang :

1. Produksi

Adapun hasil produksi PT Industri Kapal Indonesia (Persero) adalah :

- Mendesain Kapal yaitu membuat kapal untuk dijual kepada pemesan atau pemilik kapal (masih dalam bentuk gambar).
- Pembuatan Kapal Baru yaitu perusahaan membuat desain/kapal, dimana kapal dibuat di galangan kapal PT Industri Kapal Indonesia (Persero).

Adapun sumber bahan baku yang digunakan untuk membuat kapal baru tersebut berasal dari tiga sumber, tergantung dari kesepakatan bersama yaitu perusahaan mendesain kapal serta menyediakan sendiri bahan dan alat-alat yang diperlukan dalam pembuatan kapal baru, perusahaan mendesain kapal tersebut, bahan disediakan oleh pemilik atau pemesan kapal, perusahaan mendesain dan membuat kapal baru, membeli bahan baku tetapi pemilik kapal yang menentukan bahan yang akan digunakan untuk membuat kapal.

- Pembuatan Peralatan Lepas Pantai yaitu membuat alat yang digunakan oleh perusahaan minyak lepas pantai seperti pipa dan bor.
- Pabrikasi Struktur Baja yaitu membuat peralatan yang akan digunakan untuk tulang beton atau bangunan.

2. Perbaikan atau Reparasi

Adapun perbaikan/reparasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- *Running Repair*, yaitu memperbaiki kapal yang mengalami kerusakan tetapi kapal tersebut masih bisa beroperasi pada saat perbaikan, kapal yang rusak tidak perlu dibawa ke galangan kapal tetapi cukup diperbaiki ditempat dimana kapal itu rusak.
- *Floating Repair*, yaitu memperbaiki kapal yang rusak, kapal yang rusak tadi dibawa ke galangan kapal untuk diperbaiki, tetapi kapal tersebut tidak sempat dinaikkan ke darat (*Docking*), kapal cukup diperbaiki di galangan saja.
- *Docking Repair*, yaitu memperbaiki kapal yang rusak, atau kapal yang telah tiba saatnya untuk mengalami *decking* (setiap satu tahun sekali) agar tetap berjalan sebagaimana mestinya, cara kerjanya ialah kapal yang rusak dibawa ke galangan kapal, lalu kapal tersebut dinaikkan ke darat, kemudian diperbaiki.

3. Modifikasi Kapal

Modifikasi kapal yaitu kapal yang akan dimodifikasikan dibuat bentuk dan fungsinya kemudian kapal dinaikkan ke darat. Adapun modifikasi yang dilakukan PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut :

- Mengubah Kapal Barang menjadi Kapal Penumpang atau sebaliknya.
- Mengubah Kapal Tongkong menjadi Kapal Ikan atau sebaliknya.
- Mengubah Kapal Barang menjadi Kapal Tongkong atau sebaliknya.
- Mengubah Kapal Barang menjadi Kapal Ikan atau sebaliknya.

Dalam pelaksanaan operasinya sesuai dengan SK direksi No.33/DIRIKI/KPTS/VII/2001 tanggal 16 Juli 2001, mempunyai unit dok dan unit-unit usaha sebagai berikut :

1. Unit dok dan galangan Makassar
2. Unit dok dan galangan Bitung
3. Unit usaha dan perdagangan Makassar.

Pengembangan kapasitas produksi diarahkan untuk menampung permintaan jasa reparasi kapal, maupun pembuatan kapal baru berbagai *type* dan ukuran yang semakin meningkat. Sektor reparasi merupakan sasaran utama ditujukan kepada kapal-kapal yang *berhome base* di kawasan timur Indonesia. Sedangkan pembuatan kapal baru, terutama ditujukan pembuatan kapal *type* Caraka Jaya III, 28 Unit Kapal Ikan Mina Jaya 300 GRT, kapal penyeberangan, *Tug Boat*, *Supply Vessel*, serta kapal baru yang berukuran sampai dengan 10.000 DWT. Baik pesanan pemerintah, Pihak swasta, maupun ekspor.

4.2 Analisis Data Responden

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sampel karyawan PT Industri Kapal Indonesia (Persero) sebanyak 35 orang. Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data adalah melalui koesioner yang dibagikan sebanyak 35 dan dikembalikan dengan jumlah yang sama.

Sebagai awal proses analisis dalam hasil penelitian ini, dilakukan analisis terhadap karakteristik responden yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, pendidikan dan masa kerja.

4.2.1 Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persen
Laki – laki	23	70%
Perempuan	12	30%
Jumlah	35	100%

Sumber : Data diolah. Agustus

Berdasarkan data diatas nampak bahwa responden didominasi oleh laki – laki, yaitu sebanyak 70% atau 23 orang. Sedangkan responden perempuan sebanyak 30% atau 12 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampel atau responden adalah laki – laki.

4.2.2 Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan responden menjelaskan tentang latarbelakang penelitian responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, sehingga dalam penelitian ini maka tingkat pendidikan responden dapat diklasifikasikan menurut jenjang pendidikan SMU, S1, S2 dan S3. Oleh karena itu, pengelompokan jenjang pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persen
SMU	2	6%
S1	2	6%
S2	31	88%
Jumlah	35	100%

Sumber : Data diolah. Agustus

Berdasarkan tabel diatas, yakni hasil dari distribusi frekuensi responden menurut jenjang pendidikan, nampak bahwa responden lebih banyak memiliki jenjang pendidikan Strata Satu (S1) yakni sebesar 31 orang atau 88%, dan responden dengan jenjang pendidikan SMU (Sekolah Menengah Umum) yakni sebesar 2 orang atau 6% serta responden dengan jenjang pendidikan Strata Dua (S2) memiliki jumlah yang sama dengan responden dengan jenjang pendidikan SMU, 2 orang atau 6%. Hal ini menunjukkan bahwa

4.2.3 Berdasarkan Masa Kerja

Karakteristik responden menurut masa kerja memberikan gambaran mengenai lamanya responden yang telah bekerja pada perusahaan PT. Industri Kapal Indonesia (Persero), dimana karakteristik responde berdasarkan masa kerja dapat dikategorikan atas 4 kelompok yang dibawah 1 tahun, masa kerja antara1, 1-3 tahun, masa kerja 3,1-5 tahun dan masa kerja di atas 5 tahun. Oleh karena itulah disajikan karakteristik responde berdasarkan masa kerja yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Lama Bekerja	Jumlah	Persen
<1 Tahun	2	6%
1,1-3 Tahun	17	50%
3,1 – 5 Tahun	5	14%
>5 Tahun	10	28%
Jumlah	35	100%

Sumber : Data diolah. Agustus

Karakteristik responden menurut masa kerja, dimana didominasi oleh responde yang mempunyai masa kerja tahun 1,1-3 dengan jumlah 17 orang atau 50%, diikuti oleh masa kerja antara 5 tahun dengan jumlah 10 atau 28%. Hal ini menunjukkan bahwa rata – rata karyawan dan karyawan yang bekerja pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero) adalah mempunyai masa kerja di bawah 5 tahun.

4.3 Analisis Data Koesioner

4.3.1 Analisis Data Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata – rata (mean), standar deviasi, minimum, maksimum dan varian. Sebelum melakukan pengujian asumsi klasik dan pengujian regresi terlebih dahulu disajikan statistik deskriptif untuk variabel bebas dan terikat yang dapat dilihat dalam tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4
Statistik Deskriptif

[DataSet0]

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
X1.1	35	3.00	5.00	4.4857	.88688
X1.2	35	3.00	5.00	4.3143	.96319
X1.3	35	3.00	5.00	4.6000	.81168

X1.4	35	3.00	5.00	4.7714	.64561
TOTAL_SKOR_1	35	16.00	20.00	18.1714	1.96268
X2.1	35	3.00	5.00	4.7714	.64561
X2.2	35	3.00	5.00	4.6571	.76477
X2.3	35	3.00	5.00	4.6571	.76477
X2.4	35	3.00	5.00	4.7143	.71007
TOTAL_SKOR_2	35	16.00	20.00	18.8000	1.30158
X3.1	35	3.00	5.00	4.7714	.64561
X3.2	35	3.00	5.00	4.4857	.88688
X3.3	35	3.00	5.00	4.7714	.64561
X3.4	35	3.00	5.00	4.8286	.56806
TOTAL_SKOR_3	35	16.00	20.00	18.8571	1.11521
X4.1	35	3.00	5.00	4.7714	.64561
X4.2	35	3.00	5.00	4.6571	.76477
X4.3	35	3.00	5.00	4.3714	.94202
X4.4	35	3.00	5.00	4.7714	.64561
TOTAL_SKOR_4	35	16.00	20.00	18.5714	1.71988
X5.1	35	3.00	5.00	4.8286	.56806
X5.2	35	3.00	5.00	4.7143	.71007
X5.3	35	3.00	5.00	4.4857	.88688
X5.4	35	3.00	5.00	4.7143	.71007
TOTAL_SKOR_5	35	16.00	20.00	18.7429	1.54049
Y1.1	35	4.00	5.00	4.9143	.28403
Y1.2	35	4.00	5.00	4.8571	.35504

Y1.3	35	4.00	5.00	4.8000	.40584
Y1.4	35	4.00	5.00	4.6000	.49705
Y1.5	35	4.00	5.00	4.4286	.50210
Y1.6	35	4.00	5.00	4.4286	.50210
Y1.7	35	4.00	5.00	4.8286	.38239
Y1.8	35	4.00	5.00	4.9429	.23550
Y1.9	35	4.00	5.00	4.9714	.16903
TOTAL_SKOR_Y	35	42.00	45.00	42.7714	.80753
Valid N (listwise)					

Data Primer : SPSS 20. Agustus

Berikut ini adalah pendeskripsian data dari sampel karyawan yang memenuhi syarat. Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai dari total Variabel Transparansi (X_1), Akuntabilitas (X_2), Pertanggungjawaban (X_3), Indenpendensi (X_4), Keadilan (X_5) dan Kinerja Perusahaan (Y) adalah sebagai berikut :

Transparansi (X_1) adalah berkisar antara 3,00 sampai dengan 5,00 dengan total nilai Variabel sebesar 18.1714 dan standar deviasi sebesar 1.96268. Berdasarkan nilai yang diperoleh dari total rata-ratanya, perusahaan ini telah memenuhi persyaratan.

Akuntabilitas (X_2) berkisar antara 3,00 sampai dengan 5,00 dengan total nilai Variabel sebesar 18.8000 dan standar deviasi sebesar 1.30158. Berdasarkan nilai yang diperoleh dari total rata-ratanya, menjelaskan bahwa rata-rata perusahaan telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pertanggungjawaban (X_3) berkisar antara 3,00 sampai dengan 5,00 dengan total nilai Variabel sebesar 18.8571 dan standar deviasi sebesar 1.11521. Berdasarkan nilai yang diperoleh dari total rata-ratanya, data ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan menyadari akan adanya tanggungjawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan memelihara etika serta menjunjung bisnis yang sehat.

Independensi (X_4) berkisar antara 3,00 sampai dengan 5,00 dengan total dari seluruh nilai rata-rata sebesar 18.5714 dan total dari jumlah seluruh standar deviasi sebesar 1.71988. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan dalam perusahaan memiliki hak independen untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan antar karyawan dan seluruh anggota perusahaan serta pemegang saham.

Keadilan (X_5) berkisar antara berkisar antara 3,00 sampai dengan 5,00 dengan total dari seluruh nilai rata-rata sebesar 18.7429 dan total dari jumlah seluruh standar deviasi sebesar 1.54049. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota perusahaan memiliki prinsip keadilan, sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku serta mendahulukan hak para anggota perusahaan yang terlibat didalamnya.

Kinerja Perusahaan (Y) adalah antara 4,00 sampai dengan 5,00 dengan total nilai rata-rata sebesar 42.7714 dan total dari jumlah nilai seluruh standar deviasi adalah sebesar 0.80753. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menurut responden memberikan pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

4.3.2 Analisis Linear Berganda

Pengujian dan pembuktian secara empiris pengaruh independensi dan efikasi diri terhadap kinerja auditor dalam penelitian ini menggunakan statistik inferensial, yaitu dengan analisis regresi linear berganda yang diolah dengan menggunakan program *IBM SPSS 20*. Hasil analisis regresi linear berganda yang menguji pengaruh variabel independensi (X1) dan efikasi diri (X2) terhadap kinerja auditor (Y) pada Inspektorat Kabupaten Luwu Utara akan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Uji Regrasi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	43.571	3.931		11.083	.000
X1Transparansi	-.141	.072	-.342	-1.956	.060
X2Akuntabilitas	.004	.103	.006	.037	.971
X3Pertanggungjawaban	.278	.116	.384	2.401	.023
X4Indenpendensi	-.071	.092	-.150	-.768	.449
X5Keadilan	-.120	.093	-.228	-1.287	.208

a. Dependent Variable: Y
Data Primer : SPSS 20. Agustus

Berdasarkan hasil pengujian model regresi tersebut, maka model regresi yang menyatakan pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Indenpendensi dan Keadilan terhadap Kinerja Perusahaan pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut

$$Y = 43.571 + 0,313X_2 + -0.141 + 0.004 + 0.278 + -0.071 + -0.120 + E$$

Dimana:

Y = Kinerja Perusahaan

X₁ = Transparansi

X₂ = Akuntabilitas

X₃ = Pertanggungjawaban

X₄ = Independensi

X₅ = Keadilan

β₁ = 0,313

β₂ = -0.141

β₃ = 0.004

β₄ = 0.278

β₅ = -0.120

E = Variabel lain

Berdasarkan model persamaan regresi linear berganda ini, nilai konstantanya sebesar 43.571 dapat diartikan bahwa jika variabel bebas dalam model diasumsikan sama dengan nol, secara rata-rata variabel di luar model tetap akan meningkatkan kinerja Perusahaan sebesar 43.571.

4.3.3 Uji Normalisasi Data

Uji Normalisasi Data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas yang dipergunakan adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dan distribusi yang mendekati normal. Namun dengan hanya melihat grafik histogram dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel

yang kecil dan mendekati sumbu diagonalnya. Metode yang lebih menyakinkan adalah dengan melihat Normal Probability Plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Berdasarkan hasil uji normalitas yang didapatkan dari tabel Kolmogorov berikut :

Tabel 4.6

Tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		X1	X2	X3	X4	X5	Y1
N		35	35	35	35	35	35
Normal	Mean	18,1714	18,8000	18,8571	18,5714	18,7429	42,7714
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	1,96268	1,30158	1,11521	1,71988	1,54049	,80753
Most Extreme	Absolute	,339	,307	,322	,340	,336	,274
Differences	Positive	,294	,245	,322	,203	,207	,274
	Negative	-,339	-,307	-,304	-,340	-,336	-,211
Kolmogorov-Smirnov Z		2,003	1,819	1,904	2,010	1,986	1,623
Asymp. Sig. (2-tailed)		,001	,003	,001	,001	,001	,010

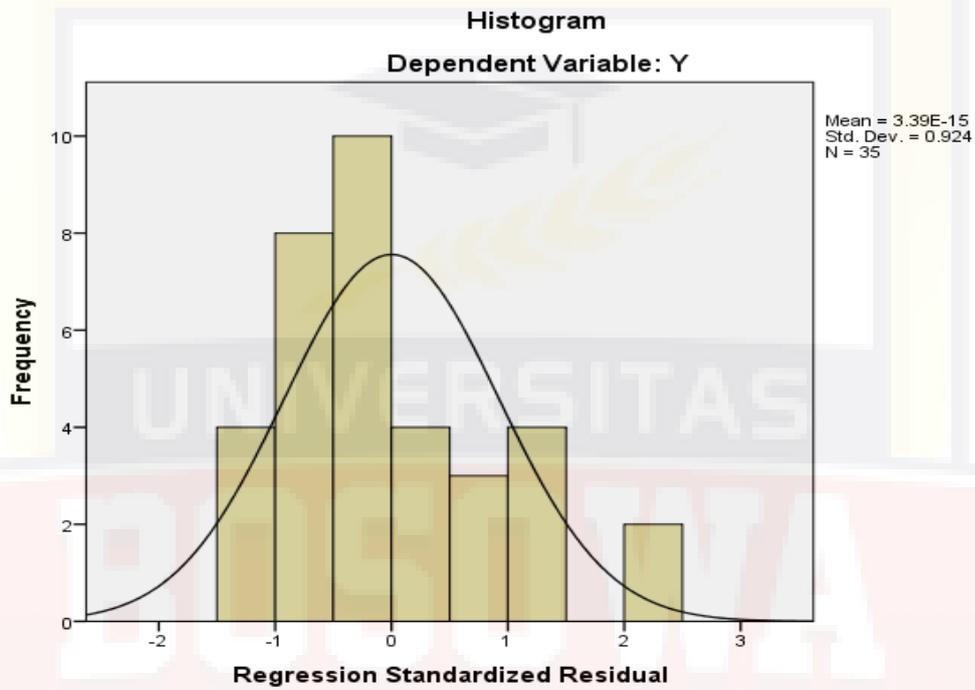
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Data Primer : SPSS 20. Agustus

Gambar 4.1

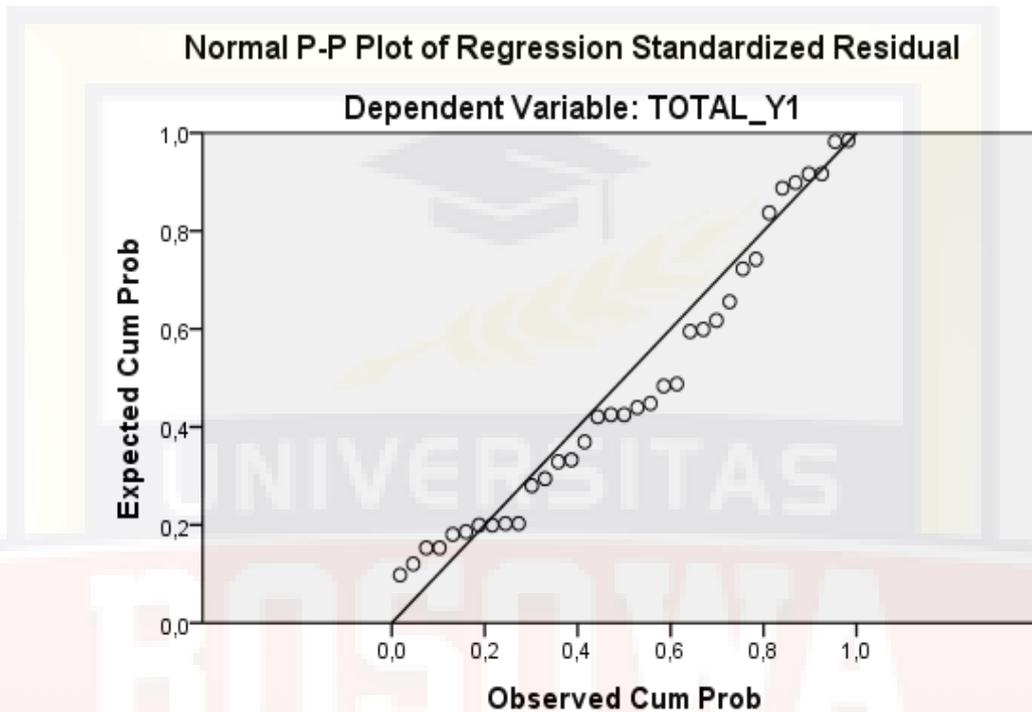
Grafik Normal Plot



Gambar diatas menunjukkan bahwa histogram atau grafik P-P plot sebagian besar tampak mengikuti kurva normal, sehingga dapat dikatakan bahwa sebaran data tersebut berdistribusi normal.

Gambar 4.2

Grafik Normal P-P Plot



Gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik yang telah mendekati garis diagonalnya atau hampir terhimpit sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.3.3 Uji Asumsi Multikolonieritas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar satu atau semua variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (*independent*). Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Ada tidaknya masalah multikolienaritas dalam regresi dapat dilihat dengan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* yang kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10.

Tabel 4.7

Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1(Transparansi)	,728	1,374
X2(Akuntabilitas)	,809	1,236
X3(Pertanggungjawab n)	,870	1,149
X4(Indenpendensi)	,581	1,722
X5(Keadilan)	,707	1,415

a. Dependent Variable: Y1(Kinerja Perusahaan)

Sumber : Data diolah. SPSS 20. Agustus

Hasil Uji Multikolineritas pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa :

1. Nilai VIF untuk variabel X1 (Transparansi) sebesar $1,374 < 10$ dan nilai *Tolerance* sebesar $0,728 > 0,10$ sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi Multikolineritas.
2. Nilai VIF untuk variabel X2 (Transparansi) sebesar $1,236 < 10$ dan nilai *Tolerance* sebesar $0,809 > 0,10$ sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi Multikolineritas.
3. Nilai VIF untuk variabel X3 (Pertanggungjawaban) sebesar $1,149 < 10$ dan nilai *Tolerance* sebesar $0,870 > 0,10$ sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi Multikolineritas.
4. Nilai VIF untuk variabel X4 (Indenpendensi) sebesar $1,722 < 10$ dan nilai *Tolerance* sebesar $0,581 > 0,10$ sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi Multikolineritas.

5. Nilai VIF untuk variabel X5 (Keadilan) sebesar $1,415 < 10$ dan nilai *Tolerance* sebesar $0,707 > 0,10$, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi Multikolinieritas.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi. Dengan tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode yang sering digunakan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson (Uji DW). Dimana jika nilai d dekat dengan 2, maka asumsi tidak terjadi autokorelasi terpenuhi.

Tabel 4.8

Durbin Watson

Durbin-Watson
1.667

Dari hasil analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Nilai dari uji Durbin-Watson adalah sebesar 1,667, nilai tersebut kurang dari 2, maka asumsi tidak terjadi korelasi.

4.3.5 Uji Goodness of Fit

Uji Goodness of Fit atau uji kelayakan model digunakan untuk mengatur ketepatan fungsi regresi sampel dengan melihat seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjalankan varians variabel terikat.

Tabel 4.9

Uji Goodness of Fit

Model	R	R Square
1	,595 ^a	,355

a. Predictors: (Constant), X5, X1, X3, X2, X4

b. Dependent Variable: Y1

Tabel tersebut memberikan nilai R sebesar 0,595 dan koefisien determinasi sebesar 0,355. Tampak bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjalankan varians variabel terikat adalah relatif rendah yaitu hanya 3,6% pada model. Masih terdapat 96,4% varians variabel terikat yang belum mampu dijelaskan oleh varian bebas dalam model.

Berdasarkan tabel 4.7, R menunjukkan korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen terhadap dependen. R bernilai 0,595 yang berarti menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara variabel bebas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, inependensi, keadilan terhadap kinerja perusahaan, dikarenakan nilai koefisien lebih besar dari nol positif.

Nilai R Square (R^2) pada tabel diatas menunjukkan koefisien determinasi, dimana angka ini diubah kedalam bentuk persentase, menunjukkan kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari data diatas terlihat bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) variabel bebas adalah 0,355 (36%) dan sisanya 64% sebabkan oleh variabel variabel lain diluar dari penelitian ini. Nilai R Square (R^2) menunjukkan bahwa penerapan dari prinsip-prinsip *Good*

Corporate Governance memberikan pengaruh cukup terhadap kinerja perusahaan pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero) .

4.4 Uji Hipotesis

4.4.1

Tabel 4.10

Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	43.571	3.931		11.083	.000
1	X1	-.141	.072	-.342	-1.956	.060
	X2	.004	.103	.006	.037	.971
	X3	.278	.116	.384	2.401	.023
	X4	-.071	.092	-.150	-.768	.449
	X5	-.120	.093	-.228	-1.287	.208

a. Dependent Variable: Y

Data pada tabel 4. Menjelaskan bahwa :

1. Pada variabel Transparansi, nilai signifikan sebesar $-1,956 < 0,05$ maka terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
2. Pada variabel Akuntabilitas, nilai signifikan sebesar $0,037 < 0,05$ maka terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
3. Pada variabel Pertanggungjawaban, nilai signifikan sebesar $2,401 > 0,05$ tidak berpengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

4. Pada variabel Independensi, nilai signifikan sebesar $-0,768 < 0,05$ maka terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

5. Pada variabel Keadilan, nilai signifikan sebesar $-1,287 < 0,005$ maka terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hasil peneritian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Amin (2016) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan tetap memberikan pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

4.4.2 Uji F

Tabel 4.11

Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	7.861	5	1.572	3.186	.021 ^b
Residual	14.310	29	.493		
Total	22.171	34			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X5, X1, X3, X2, X4

Sumber data : Diolah SPSS 20.

Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F) pada tabel 4.8, Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 4,178 dengan nilai signifikan yaitu $0,021 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *Corporate Governance* memengaruhi secara simultan variabel dependen yakni kinerja perusahaan

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungan analisis statistik deskriptif diketahui bahwa rata-rata dari masing-masing perhitungan variabel Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Pertanggungjawaban (X3), Indenpendensi (X4) dan Keadilan (X5) terhadap Kinerja Perusahaan (Y) mayoritas responden cenderung menyatakan setuju akan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)
2. Transparansi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja perusahaan. Artinya, transparansi memberikan kontribusi positif terhadap kinerja perusahaan .
3. Akuntabilitas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja perusahaan. Artinya, dengan adanya penciptaan system pengawasan efektif memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan kinerja perusahaan.
4. Pertanggungjawaban berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap kinerja perusahaan. Artinya, pertanggungjawaban memberikan kontribusi positif namun tidak berpengaruh secara signifikan.
5. Indenpendensi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja perusahaan. Artinya, dalam mengambil keputusan seluruh organ perusahaan berjalan selaras.

6. Keadilan, berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja perusahaan. Artinya, seluruh organ perusahaan diperlakukan sesuai dengan jabatan dan peraturan yang berlaku di perusahaan.

5.2 Saran

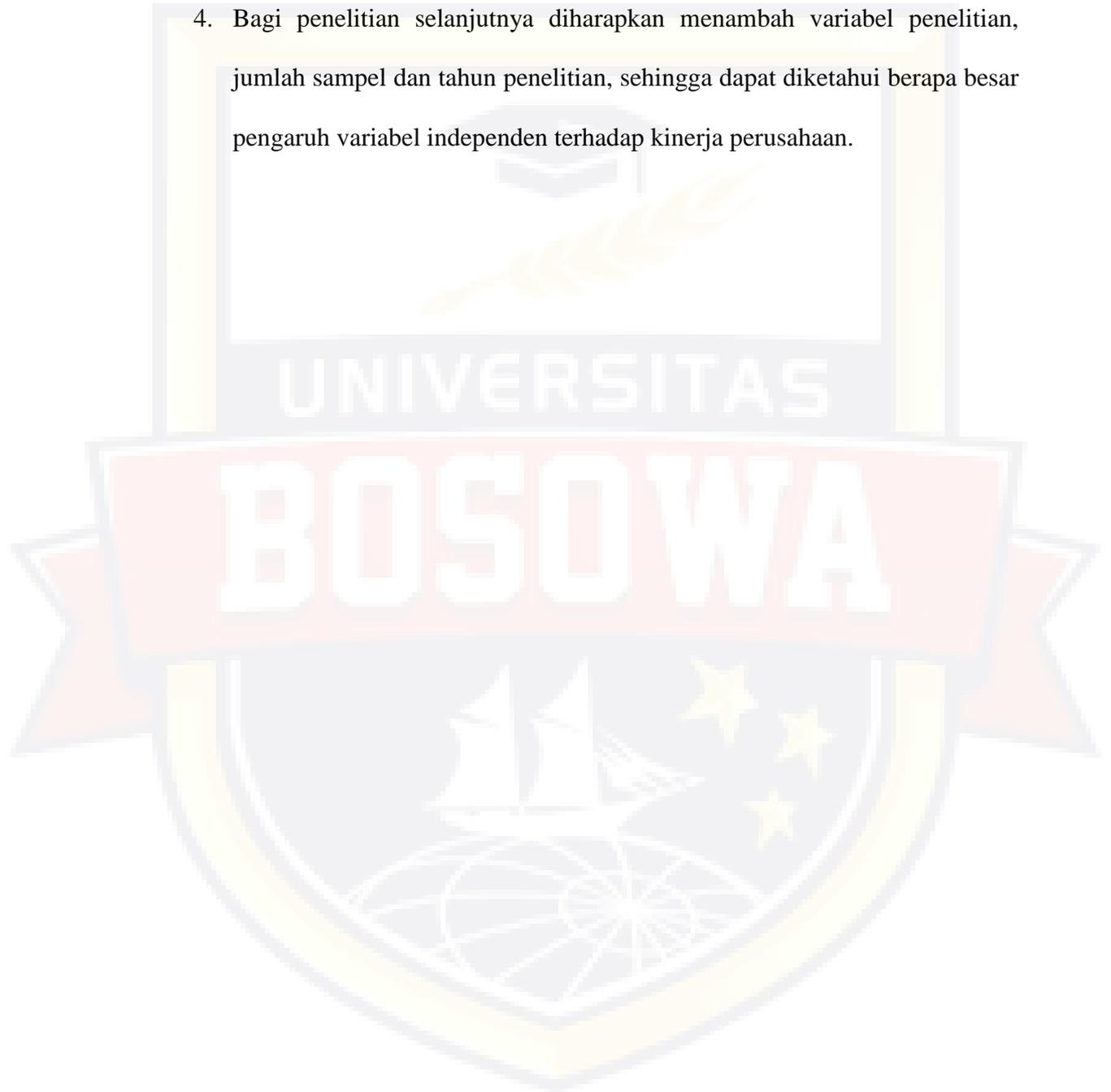
Saran yang dapat diajukan oleh penulis berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Saran yang dapat diajukan oleh penulis berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dengan melihat hasil penelitian bahwa prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang terdiri dari variabel Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Keadilan (X5) berpengaruh Kinerja Perusahaan (Y) maka perusahaan perlu memperhatikan selalu penerapan prinsip-prinsip tersebut agar kinerja karyawan bisa selalu terkontrol bahkan meningkat.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memanfaatkan pertimbangan bagi pihak PT Industri Kapal Indonesia (Persero) agar dapat meningkatkan dan mengevaluasi Kinerja Perusahaan. Dengan mengimplementasikan Prinsip Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), maka kinerja perusahaan diharapkan menjadi efisien, efektif, dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan dan memperhatikan stakeholdernya.
3. Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut juga perlu diperhatikan terkait dengan surat keputusan pemerintah yang memiliki tujuan tersendiri dalam

menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) yang berlandaskan Keputusan Menteri Nomor 117/M-MBU/2002 pasal 4.

4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel penelitian, jumlah sampel dan tahun penelitian, sehingga dapat diketahui berapa besar pengaruh variabel independen terhadap kinerja perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Anton. 2012. Analisis Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas AKI
- Cahyani, Nuswandari, 2009. *Pengaruh Corporate Governance Perception Indeks terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur*. Jurnal Manajemen Vol.16 No.2.
- Che Haat, Mohd Hassan, Rashidah A.R. And Sakthi. M. (2008). *Corporate Governance, Transparency and Performance of Malaysian Companies*, Manajerial Auditing Journal Vol. 23 No. 8 pp. 744-778.
- Effendi, Muh. Arief. 2009. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Salemba Empat, Jakarta.
- Febriani, Jayanti Ike, dan Tri Wulida Afrianty “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja” Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 32 No. 1 Maret 2016 administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id
- Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2002. www.fcgi.com
- Gusti Amri. Oktober 2011. “*Komisaris Independen dan GCG*”. <http://gustiphd.blogspot.com/2011/10/komisarisindependen-dan-gcg.html>.
- Herawaty, Vinola. 2008. *Peran Praktek Corporate Governance sebagai Moderating Variable dari Pengaruh Earnings Management Terhadap Nilai Perusahaan*. Jurnal Akuntansi dan keuangan, 10(2), pp. 97-108.
<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-penilaian-kinerja-pegawai.html>
- Jensen, M.C dan Meckling, W. H. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*. Vol3 (4). October 1976: 305-360.
- Kementrian BUMN. 2002. SK Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 tentang *Penerapan Praktik Good Corporate Governance* pada BUMN. Jakarta: Kementrian BUMN.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance*. Jakarta: KNKG.
- Pieris, John dan Nizam Jim.”*Etika Bisnis dan Good Corporate Governance*”. Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007
- Pramuka, Agus Bambang. 2007. *Mekanisme Corporate Governance*, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan, SNA X. Makassar.

Price Waterhouse Coopers, “*Conceptual Model of Corporate Governance Definitio*,” (Makalah disampaikan pada BPPN *Workshop for Recapitalised*, Jakarta, 27 September 2000) dalam Misahardi Wilamarta, Op.cit., hlm. 37.

Purwani, Tri. 2010. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan. Jurnal Ilmiah. Universitas AKI

Shleifer, A dan R.W Vishny (1997). “ *A Survey Of Corporate Governance*”. Jurnal of Finance. Vol 52. NO.2 Juni. pp. 737-783

Siallagan & Machfoedz, M. 2006. Mekanisme *Corporate Governance*, *Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan*. Makalah SNA IX

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.

Surya, Indra dan Ivan Yustiavanda. 2008. *Penerapan Good Corporate Governance : Mengesampinkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta : Kencana.

Sutedi, Ardian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zarkasyi, Moh. Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa

Statistik Deskriptif

[DataSet0]

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Transparansi1	35	2	3	5	157	4.49	.887
Transparansi2	35	2	3	5	151	4.31	.963
Transparansi3	35	2	3	5	161	4.60	.812
Transparansi4	35	2	3	5	167	4.77	.646
TOTAL_X1	35	4	16	20	636	18.17	1.963
Akuntabilitas1	35	2	3	5	167	4.77	.646
Akuntabilitas2	35	2	3	5	163	4.66	.765
Akuntabilitas3	35	2	3	5	163	4.66	.765
Akuntabilitas4	35	2	3	5	165	4.71	.710
TOTAL_X2	35	4	16	20	658	18.80	1.302
Pertanggungjawaban1	35	2	3	5	167	4.77	.646
Pertanggungjawaban2	35	2	3	5	157	4.49	.887
Pertanggungjawaban3	35	2	3	5	167	4.77	.646
Pertanggungjawaban4	35	2	3	5	169	4.83	.568
TOTAL_X3	35	4	16	20	660	18.86	1.115
Independensi1	35	2	3	5	167	4.77	.646
Independensi2	35	2	3	5	163	4.66	.765
Independensi3	35	2	3	5	153	4.37	.942
Independensi4	35	2	3	5	167	4.77	.646
TOTAL_X4	35	4	16	20	650	18.57	1.720
Keadilan1	35	2	3	5	169	4.83	.568
Keadilan2	35	2	3	5	165	4.71	.710
Keadilan3	35	2	3	5	157	4.49	.887

Keadilan4	35	2	3	5	165	4.71	.710
TOTAL_X5	35	4	16	20	656	18.74	1.540
Kinerja Perusahaan1	35	1	4	5	172	4.91	.284
Kinerja Perusahaan2	35	1	4	5	170	4.86	.355
Kinerja Perusahaan3	35	1	4	5	168	4.80	.406
Kinerja Perusahaan4	35	1	4	5	161	4.60	.497
Kinerja Perusahaan5	35	1	4	5	155	4.43	.502
Kinerja Perusahaan6	35	1	4	5	155	4.43	.502
Kinerja Perusahaan7	35	1	4	5	169	4.83	.382
Kinerja Perusahaan8	35	1	4	5	173	4.94	.236
Kinerja Perusahaan9	35	1	4	5	174	4.97	.169
TOTAL_Y	35	3	42	45	1497	42.77	.808
Valid N (listwise)	35						

Sumber Data : SPSS 20 Tahun 2018

Regresi Linear Berganda

[DataSet0]

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X5, X1, X3, X2, X4 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.595 ^a	.355	.243	.702	.355	3.186	5

Model Summary^b

Model	Change Statistics		Durbin-Watson
	df2	Sig. F Change	
1	29 ^a	.021	1.667

a. Predictors: (Constant), X5, X1, X3, X2, X4

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.861	5	1.572	3.186	.021 ^b
	Residual	14.310	29	.493		
	Total	22.171	34			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X5, X1, X3, X2, X4

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	43.571	3.931		11.083	.000
X1	-.141	.072	-.342	-1.956	.060
X2	.004	.103	.006	.037	.971
X3	.278	.116	.384	2.401	.023
X4	-.071	.092	-.150	-.768	.449
X5	-.120	.093	-.228	-1.287	.208

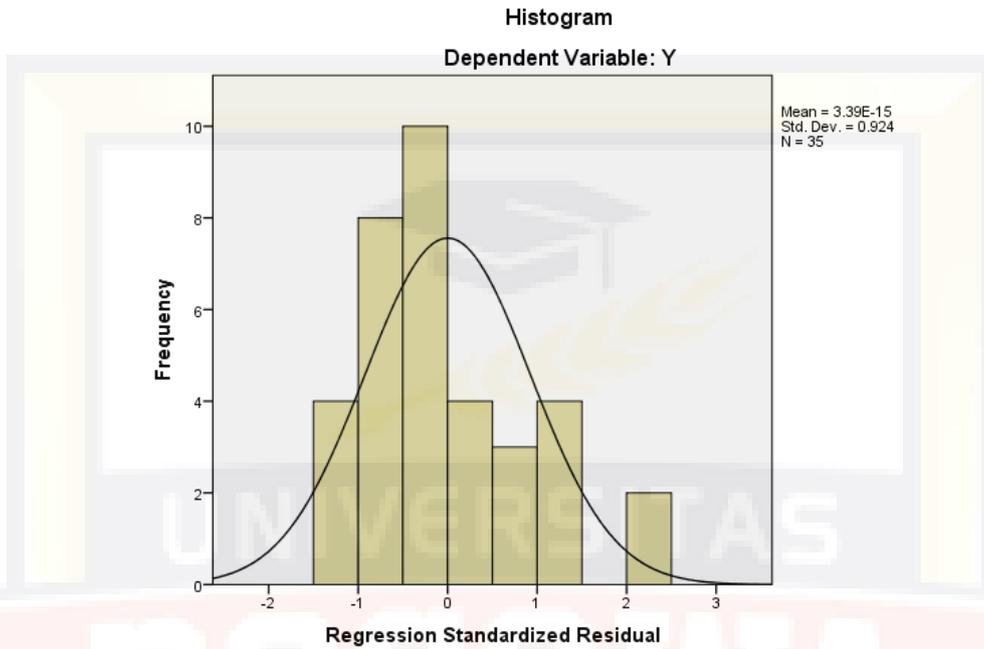
a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	42.02	43.91	42.77	.481	35
Residual	-.909	1.521	.000	.649	35
Std. Predicted Value	-1.560	2.366	.000	1.000	35
Std. Residual	-1.294	2.165	.000	.924	35

a. Dependent Variable: Y

Grafik



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

